



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR: 5 TAHUN 2023

TENTANG

MASTER PLAN SMART CITY KABUPATEN MAROS
TAHUN 2023-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang komunikasi dan Informatika bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa smart city merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui program kerja dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan integral yang dapat meningkatkan fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, budaya dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat yang dituangkan dalam *Master Plan Smart City*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Maros tentang *Master Plan Smart City* Kabupaten Maros Tahun 2023-2028.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Noor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebaagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyampaian Informasi Kebencanaan Melalui Jaringan Bergerak Seluler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 128);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Maros Nomor 149 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017-2021;
12. Peraturan Bupati Maros Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan E-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MASTER PLAN SMART CITY KABUPATEN MAROS TAHUN 2023-2028.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Maros.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026.
8. *Master Plan Smart City* adalah konsep pengelolaan kota berkelanjutan dan berdaya saing yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat, dan lebih makmur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta inovasi yang diarahkan untuk perbaikan kinerja, meningkatkan efisiensi dan melibatkan partisipasi masyarakat.
9. Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman dalam penyusunan pengembangan *Master Plan Smart City* secara terpadu.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan landasan materi dan implementasi praktis rencana pembangunan daerah berdasarkan dokumen pengembangan *Master Plan Smart City*;
 - b. memberikan panduan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan 6 (enam) dimensi *Smart City* yaitu *Smart Governance*, *Smart Economy*, *Smart Society*, *Smart Branding*, *Smart Living*, dan *Smart Environment*; dan
 - c. memberikan prioritas pengembangan *Smart City* dalam jangka waktu 5 (lima) tahun (2023-2028).

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. *Master Plan smart City*;
- b. elemen dan sasaran *Smart City*;
- c. rencana aksi *Smart City*;
- d. pembinaan dan pendampingan; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV
MASTER PLAN SMART CITY

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan *Smart City* maka perlu disusun *Master Plan Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.
- (2) *Master Plan Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerangka kerja atau panduan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pengembangan *Smart City* melalui penetapan kebijakan, regulasi dan arah serta prioritas program pembangunan daerah yang disusun berdasarkan visi, identitas dan karakter daerah.
- (3) Dalam Dokumen *Master Plan Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan rencana program pembangunan daerah yang dijabarkan dalam program kerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan prioritas pada bidang :
 - a. Pelayanan publik;
 - b. Pemberdayaan ekonomi;
 - c. Pariwisata;
 - d. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM); dan
 - e. Pendidikan, kesehatan, keamanan dan bencana.
- (4) Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga tidak membatasi pelaksanaan program kerja pada perangkat daerah.
- (5) *Master Plan Smart City* dilaksanakan secara bertahap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
ELEMEN DAN SASARAN *SMART CITY*

Pasal 5

Elemen *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :

- a. Tata Kelola Pemerintahan Pintar (*Smart Governance*);
- b. *Branding* Daerah Pintar (*Smart Branding*);

- c. Ekonomi Pintar (*Smart Economy*);
- d. Hidup Pintar (*Smart Living*);
- e. Masyarakat Pintar (*Smart Society*); dan
- f. Lingkungan Pintar (*Smart Environment*).

Pasal 6

- (1) Tata Kelola Pemerintahan Pintar (*Smart Governance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan tata kelola kota pintar yang mengutamakan tata kelola dari pemerintah daerah sebagaimana institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota.
- (2) Sasaran Tata Kelola Pemerintahan Pintar (*Smart Governance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

Pasal 7

- (1) *Branding* Daerah Pintar (*Smart Branding*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam memasarkan potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.
- (2) *Branding* Daerah Pintar (*Smart Branding*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan 3 (tiga) elemen, yaitu :
 - a. pariwisata;
 - b. bisnis; dan
 - c. wajar kota.

Pasal 8

Ekonomi Pintar (*Smart Economy*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, memiliki sasaran yakni:

- a. mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan di era informasi saat ini; dan
- b. meningkatkan pembelajaran finansial kepada masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan transaksi non tunai (*less-cash society*).

Pasal 9

- (1) Hidup Pintar (*Smart Living*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan upaya untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat.
- (2) Sasaran Hidup Pintar (*Smart Living*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman dan efisien.

Pasal 10

- (1) Masyarakat Pintar (*Smart Society*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan inovasi untuk mewujudkan interaksi antar manusia semakin terjalin secara intensif sehingga terwujud interaksi antar-warga yang semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi.
- (2) Sasaran Masyarakat Pintar (*Smart Society*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi.

Pasal 11

- (1) Lingkungan Pintar (*Smart Environment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan pengelolaan lingkungan yang pintar, adanya perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan pembangunan infrastruktur fisik bagi warga.
- (2) Sasaran Lingkungan Pintar (*Smart Environment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggungjawab dan berkelanjutan.

BAB VI

RENCANA AKSI SMART CITY

Pasal 12

- (1) Elemen *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara bertahap berdasarkan *Master Plan smart City*.
- (2) Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam rencana aksi yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai *Road Map Smart City* yang merupakan tahapan rencana kerja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pengembangan *Smart City*.
- (3) Pelaksanaan rencana aksi menuju *Smart City* daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah mengacu pada dokumen pengembangan *Master Plan Smart City*.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terhadap Perangkat Daerah atas pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan *Smart City*.
- (2) Kepala perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika melakukan pendampingan dan evaluasi atas pelaksanaan program pembangunan *Smart City* dan melaporkan kepada Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan atas pelaksanaan program Smart City sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 18 Januari 2023
BUPATI MAROS,


A.S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 18 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

BAB VI. PENUTUP

Sebagai rangkaian dari buku Master Plan Smart City di Kabupaten Maros, Buku Kedua ini merupakan substansi utama terkait pembahasan program dan rencana aksi yang akan dilaksanakan Kabupaten Maros dalam pengembangan Kota Cerdas. Program dan rencana aksi yang terkandung dalam buku ini selaras dengan arah pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Maros 2021-2026. Program-program dalam buku ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu jangka pendek 1-2 tahun, jangka menengah 3-5 tahun, serta jangka panjang 6-10 tahun untuk menjalankan pembangunan kota cerdas yang berkelanjutan. Susunan program dan kegiatan inovasi smart city dalam buku ini juga dapat dijadikan sebagian acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaannya. Pembangunan Smart City di Kabupaten Maros diharapkan mampu berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan arah pembangunan daerah.

BUPATI MAROS,



A. S. CHAIDIR SYAM

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 5 TAHUN 2023

TANGGAL : 18 JANUARI 2023

TENTANG : **MASTER PLAN SMART CITY
KABUPATEN MAROS TAHUN
2023-2028**

MASTER PLAN SMART CITY KABUPATEN MAROS

BAB I. PENDAHULUAN

Buku Masterplan Smart City Kabupaten Maros pada Bab 1 terdiri dari empat bagian yang meliputi latar belakang, tujuan, landasan hukum, dan kerangka pikir. Pertama, membahas tentang alasan dasar penyusunan buku masterplan smart city serta informasi, kondisi, dan gambaran umum terkait Kabupaten Maros. Kedua, berisi tentang maksud dan tujuan penyusunan buku masterplan smart city Kabupaten Maros. Kemudian dilanjutkan oleh rujukan maupun regulasi daerah dan nasional terkait pelaksanaan program smart city. Yang terakhir merupakan kerangka pikir yang menjelaskan hubungan antara buku Masterplan Smart City dengan RPJMD, Renstra OPD, dokumen masterplan atau perencanaan lainnya.

I.1. Latar Belakang

Tren global dalam perkembangan teknologi menuntut kota-kota di seluruh dunia menjadi produktif, inovatif, dan dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi masa depan. Percepatan teknologi dan informasi mengharuskan semua aspek dalam kehidupan untuk beradaptasi dengan cepat, termasuk dalam permasalahan kota. Dalam rangka menindak lanjuti dan memenuhi kebutuhan masyarakat pada perkotaan, maka muncul sebuah konsep pembangunan kota cerdas dengan optimalisasi teknologi. Untuk itu, sebagai wujud adaptasi dan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah, Kabupaten Maros melakukan pembangunan pada program smart city.

Tujuan utama smart city adalah untuk mengoptimalkan fungsi kota dan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga dengan menggunakan teknologi pintar dan analisis data. Optimalisasi teknologi bertujuan untuk membuka informasi secara optimal yang saling berhubungan yang tersedia saat ini untuk lebih memahami dan mengontrol serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Dengan kata lain, smart city merupakan kerangka kerja teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan, menyebarkan, dan mempromosikan praktik pembangunan untuk mengatasi tantangan perkotaan dan menciptakan infrastruktur yang didukung teknologi dan berkelanjutan.

Kabupaten Maros pada awalnya merupakan wilayah kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Marusu. Kerajaan tersebut dipengaruhi oleh dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yakni Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa. Selain nama Maros, masih terdapat nama lain daerah ini, yakni Marusu

dan/atau Buttasalewangan. Ketiga nama tersebut oleh sebagian masyarakat Kabupaten Maros sangat melekat dan menjadikan sebagai lambang kebanggaan tersendiri dalam mengisi pembangunan daerah. Pada waktu itu, Maros sudah memiliki nilai strategis yang sangat potensial. Kabupaten Maros dari dulu hingga saat ini dihuni oleh dua suku, yaitu Suku Bugis dan Suku Makassar.

Kemudian setelah kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan No. 34 1952 juncto PP. No. 2/1952 tentang pembentukan Afdelling Makassar yang di dalamnya tercakup Maros sebagai sebuah Onderafdeling dengan 16 buah distrik. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 Kabupaten Maros Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros, menjelaskan

Kabupaten Maros secara geografis terletak di bagian barat Propinsi Sulawesi Selatan sekitar 30 km arah utara Kota Makassar.

Luas Kabupaten Maros adalah 1.619,12 km² atau 3,53% dari luas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Maros berada pada peringkat ke 10 yang terluas dari seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Secara geografis, letak Kabupaten Maros sangat strategis karena sangat dekat dengan Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, Kabupaten Maros merupakan bagian administrasi dari Provinsi Sulawesi Selatan yang tergabung dalam 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Kabupaten Maros berbatasan langsung dengan Kabupaten Pangkep di sebelah utara, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan, Kabupaten Bone di sebelah timur, dan Selat Makassar di sebelah barat.

Perencanaan pembangunan daerah melalui konsep Smart City telah menjadi tren di seluruh penjuru dunia, termasuk daerah-daerah di Indonesia. Di era modern, konsep Smart City bukan lagi menjadi pilihan, namun sudah menjadi kebutuhan, khususnya bagi Pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam menyejahterakan rakyatnya. Gerakan Menuju 100 Smart City yang diinisiasi oleh Kementerian Kominfo pada tahun 2017 telah membantu banyak daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya melalui pendekatan smart city. Kabupaten Maros menyampaikan ketertarikannya untuk melakukan akselerasi pembangunan dengan menggunakan konsep Smart City atau Kota Pintar. Dengan adanya pembangunan melalui pendekatan Smart City, maka akan terbentuk ruang inovasi tanpa batas untuk menyelesaikan berbagai persoalan, memenuhi kebutuhan, dan potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Maros dengan memanfaatkan teknologi sebagai faktor pendorong utama.

Berdasarkan kondisi umum daerah, permasalahan pembangunan daerah, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, baik skala lokal, regional, nasional maupun isu global, maka dirumuskan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

“MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN BERDAYA SAING”

Kata “sejahtera” memiliki makna bahwa masyarakat Maros dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan serta

mendapatkan pelayanan dasar berupa pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan yang layak, layanan sosial, dan perlindungan baik dari aspek keamanan dan ketertiban maupun aspek kebencanaan. “Religius” memiliki makna terciptanya kondisi tata hubungan masyarakat yang serasi dan selaras berdasarkan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan norma hukum.

Sementara itu kata “berdaya saing” berarti terwujudnya kondisi masyarakat dan wilayah Kabupaten Maros yang memiliki kemampuan kompetitif dan ketangguhan untuk menghadapi persaingan global pada masa yang akan datang yang meliputi infrastruktur, perekonomian, sumber daya manusia, iklim usaha, dan tata kelola birokrasi. Berdasarkan visi Kabupaten Maros maka disusunlah visi smart city Kabupaten Maros, yaitu:

“Menuju Kabupaten Maros yang Sejahtera, Religius, dan Berdaya Saing dengan Kecerdasan yang Harmonis”

Pada akhirnya “kecerdasan dalam harmoni” juga dapat diterjemahkan sebagai upaya untuk menempatkan inovasi yang didorong oleh pemanfaatan teknologi (TIK) dalam proses-proses yang dijalankan secara harmonis. Sehingga, pengembangan smart city di Kabupaten Maros dapat membuat menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan cerdas dan mecerdaskan masyarakat untuk mencapai harmoni kebersamaan.

I.2. Tujuan

Masterplan Smart City merupakan dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan smart city yang berupa inisiatif-inisiatif program beserta peta jalannya (road map). Inisiatif smart city dibuat berdasarkan permasalahan yang muncul di Kabupaten Maros berdasarkan analisis dari RPJMD, Renstra, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, serta hasil FGD selama Bimtek Smart City. Sehingga, analisis dalam masterplan menghasilkan inisiatif yang memberikan solusi yang secara umum bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
3. Meningkatkan ekonomi masyarakat; dan
4. Meningkatkan keberlangsungan lingkungan hidup.

Implementasi dari inisiatif dalam masterplan smart city dapat dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu a) pendekatan pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi, b) pendekatan pemberdayaan potensi kota, serta c) pendekatan pemberdayaan manusia yang berkesinambungan. Sehingga, pengembangan smart city di Kabupaten Maros tidak hanya terfokus pada penggunaan TIK, namun juga dapat memaksimalkan potensi daerah dan sumber daya yang dimiliki.

I.3. Landasan Hukum

Dalam pengembangan smart city, salah satu aspek yang dilihat adalah perkembangan kebijakan dan regulasi kebijakan daerah. Hal ini merupakan elemen yang sangat signifikan mengingat seluruh kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah harus memiliki payung hukum yang jelas. Produk hukum yang berlaku juga akan

memengaruhi seberapa jauh implementasi program bisa dilakukan dengan dukungan legal yang mengikat. Berikut merupakan regulasi ataupun aturan pemerintah terkait pengembangan smart city di Kabupaten Maros:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Telematika di Indonesia;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika 57/KEP/M.Kominfo/12/2003, tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.Kominfo/11/2007 Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 tentang PPID;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyampaian Informasi Kebencanaan melalui Jaringan Bergerak Seluler;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 tahun 2016 tentang Manajemen Pengamanan Informasi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kepala Daerah Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Program Menuju 100 Kota Cerdas di Indonesia;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros 2021-2026
17. Peraturan Bupati Maros Nomor 149 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017-2021;
18. Peraturan Bupati Maros Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan dan Pengembangan E-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros;
19. Surat Keputusan Bupati Maros Nomor 309/KPTS/496/1/2022 tentang Pembentukan Dewan Smart City dalam lingkup Kabupaten Maros tahun 2022; dan
20. Surat Keputusan Bupati Maros Nomor 310/KPTS/496/12022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Smart City dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Maros tahun 2022.

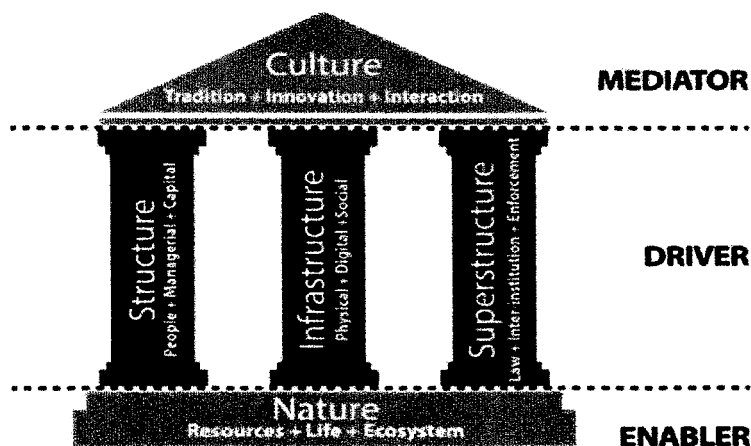
I.4. Kerangka Pikir

Smart city merupakan sebuah kerangka masa depan yang berperan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan dan tantangan perkotaan. Kerangka smart city dilakukan dengan melakukan integrasi infrastruktur jaringan ke aplikasi cerdas yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kemacetan lalu lintas, meningkatkan efisiensi jaringan listrik, mengotomatiskan pembacaan meteran utilitas, dan mengotomatiskan berbagai proses manual sebelumnya. Selain itu, smart city juga bertujuan untuk mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan dengan meningkatkan layanan masyarakat dengan mengintegrasikan beberapa elemen yang berada di wilayah perkotaan.

Alur kerja smart city membuat seluruh lembaga bekerja sama saling membantu untuk mengisi kekosongan yang tidak hanya bisa ditutup oleh suatu lembaga dan menuntut adanya *cross-cutting* lintas lembaga. Secara sederhana, smart city adalah kerangka kerja yang berkolaborasi antara teknologi informasi dan komunikasi, teknologi *internet of things*, dan individu sebagai sumber daya manusia sekaligus pembuat kebijakan untuk mengatasi isu strategis perkotaan dan menciptakan pembangunan secara berkelanjutan. Selain berfokus pada pengoptimalan teknologi, manusia juga merupakan elemen yang penting dalam pembangunan program smart city. Salah satunya adalah pembuat kebijakan dan perencana kota yang berperan dalam menerapkan desain, program, kebijakan, dan proses yang berkelanjutan untuk mengukur kemajuan menuju kota cerdas yang ideal.

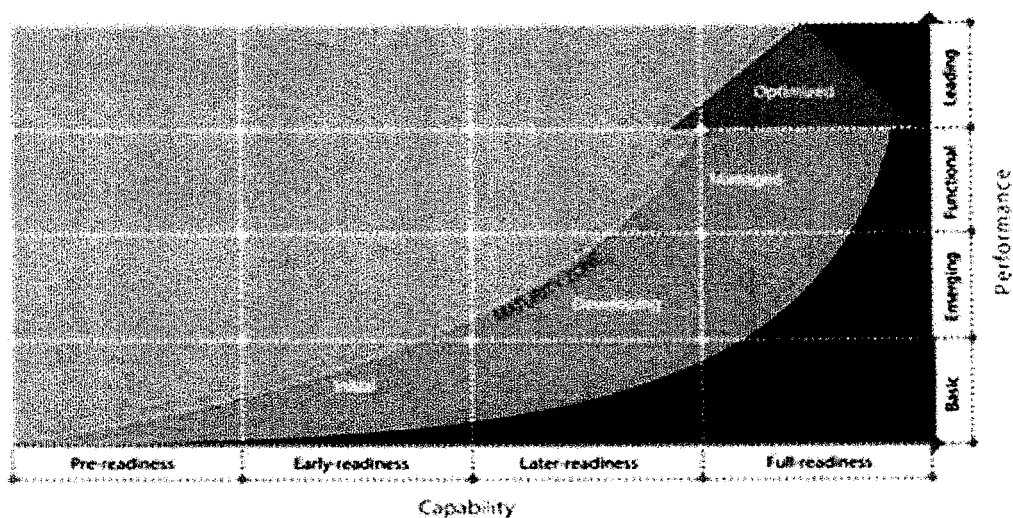
Dalam proses pembangunan Smart City, Kabupaten Maros melakukan berbagai persiapan untuk mewujudkan Maros Smart City. Agar mendapatkan gambaran tentang kesiapan daerah, maka dilakukan analisis kesiapan Smart City untuk Kabupaten Maros dalam melakukan pembangunan daerah dengan pendekatan smart city. Tiga komponen utama yang menjadi pilar dalam analisis kesiapan daerah adalah kesiapan struktur, infrastruktur dan superstruktur. Analisis struktur dilakukan untuk mengetahui kondisi dari unsur utama yang menjadi penggerak dalam pembangunan daerah di Kabupaten Maros yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya, serta kapasitas dan kapabilitas daerah. Kesiapan infrastruktur di Maros memberi

gambaran terkait kondisi sarana dan prasarana fisik yang dibutuhkan dalam pembangunan Smart City. Suprastruktur merupakan langkah penyiapan kebijakan atau peraturan Kabupaten Maros, kelembagaan, dan tata laksana pelaksanaan pembangunan Smart City agar dapat direalisasikan secara ideal dan logis berdasarkan analisis kesiapan daerah lainnya.



Gambar I - 1 Smart City Readiness (Sumber Citiasia Inc., 2016)

Kota yang cerdas merupakan gambaran umum dari suatu daerah yang memiliki berbagai inovasi dalam segala aspek agar menjadi daerah yang layak dan nyaman huni. Oleh karena itu, terdapat enam dimensi yang menjadi acuan dalam pengembangan smart city di Kabupaten Maros. Dimensi Smart City yang menjadi aspek perubahan meliputi tata kelola birokrasi (*Smart Governance*), permukiman penduduk (*Smart Living*), lingkungan masyarakat (*Smart Society*), pertumbuhan ekonomi (*Smart Economy*), citra kota/daerah (*Smart Branding*), dan pemeliharaan lingkungan (*Smart Environment*). Masing-masing dimensi memiliki sub-dimensi yang lebih rinci untuk menentukan indikator keberhasilannya.



Gambar I - 2 Smart City Maturity Model (Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN))

Selain kesiapan daerah, tingkat kematangan smart city juga dapat menjadi salah satu tolok ukur dalam perancangan program smart city. Kematangan

smart city dibagi ke dalam empat tingkat, yaitu initial yang merupakan tingkat awal dalam proses pembangunan smart city; developing artinya suatu daerah sudah mengembangkan berbagai program pembangunan berbasis Smart City dan memiliki dukungan Smart City Readiness yang cukup baik; managed berarti secara umum suatu daerah telah berada pada tingkat pelaksanaan smart city dengan baik pada berbagai aspek dengan dukungan readiness yang sangat baik pula; serta optimized yang berarti tingkat penyempurnaan pembangunan program smart city pada berbagai elemen, dimensi, dan aspek.

1. Smart Governance

Sasaran : Mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

Sub-dimensi Smart Governance:

a. Pelayanan Publik

- Pelayanan administrasi kepada masyarakat yang meliputi: status kewarganegaraan, status usaha, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan atas barang;
- Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat misalnya: sembilan bahan pokok, air bersih, dan lain-lain; dan
- Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok bagi masyarakat misalnya: jaringan telepon, listrik, internet, dan lain-lain.

b. Manajemen Birokrasi yang Efisien

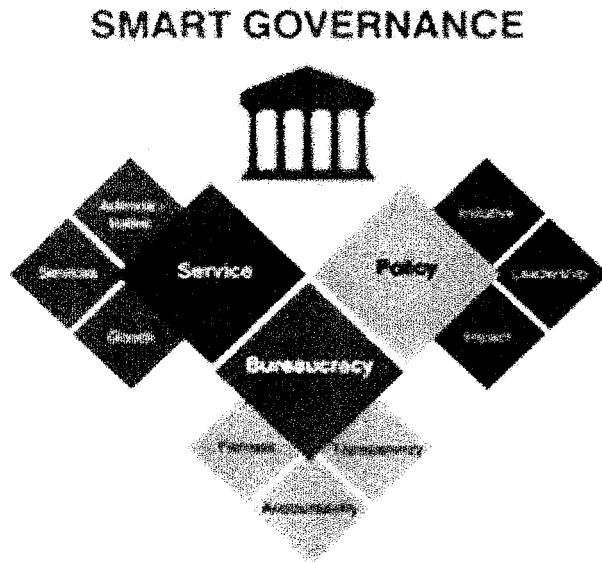
Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan, bertanggungjawab dan keterbukaan. Beberapa hal yang bisa dilakukan dalam sub-dimensi ini seperti sistem e-planning, ebudgeting, e-monev, dan beberapa kegiatan lainnya yang dapat menyederhanakan sistem birokrasi pada suatu daerah. Pengembangan aplikasi e-gov harus diarahkan menuju integrated & interoperability e-gov atau yang saling berkomunikasi dan terhubung antar satu aplikasi dengan aplikasi lainnya serta lintas OPD atau yang disebut dengan Smart e-Gov. Pelayanan

Smart e-Gov ini perlu didukung dengan sebuah "City Operation Center (COC)".

c. Efisiensi Kebijakan Publik.

- Pengambilan kebijakan publik dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan; dan
- Sistem informasi kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Melalui dua

indikator tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan daerah yang diambil oleh pemerintah.



Gambar I - 3 Struktur Smart Governance (Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN))

Smart governance merupakan penggunaan teknologi dan inovasi untuk memfasilitasi dan mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan yang lebih baik dalam badan pemerintahan. Pembangunan tata kelola pemerintahan ini sering dikaitkan dengan peningkatan proses demokrasi dan mengubah cara pelayanan publik dengan optimalisasi teknologi. Smart governance juga berperan dalam memastikan lingkungan yang kolaboratif, transparan, partisipatif, berbasis komunikasi dan berkelanjutan bagi warga negara dan pemerintah. Dengan kata lain, smart governance berbicara tentang efisiensi layanan publik kota pintar dan peningkatannya melalui inovasi tanpa melupakan inklusivitas demokratis penghuninya.

2. Smart Branding

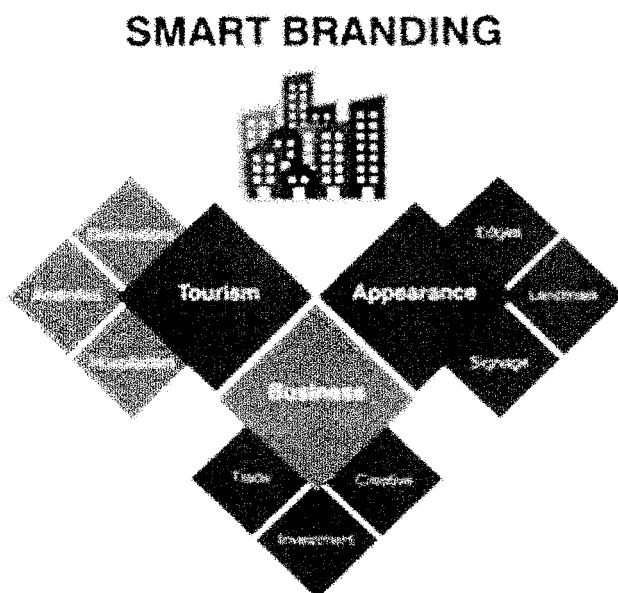
Sasaran : Meningkatkan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Sub-dimensi Smart Branding:

a. Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata

- Membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan
(*destination*);
- Membangun infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan (*amenities*) misalnya jalan, transportasi, hotel/motel/*bedding & breakfast* (B&B), restoran, dan lainlain; dan

- Membangun budaya yang ramah kepada pengunjung (*hospitality*) termasuk kemampuan berbahasa asing, ketersediaan tour-guide dan lain-lain.
- Membangun Platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah
- Membangun platform dan memasarkan ekosistem perdagangan yang kondusif dan nyaman, misalnya *marketplace* daerah;
- Membangun dan memasarkan ekosistem investasi yang mudah dan efektif, misalnya Investment Lounge, Dashboard, dan Portal Investasi Daerah; dan
- Membangun dan memasarkan produk dan jasa industri kreatif daerah misalnya kuliner, kriya, fashion, digital, dan lain-lain.
- Membangun dan memasarkan wajah atau citra kota.
- Mewujudkan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional; dan
- Membangun batas wilayah (*edge*), membangun penanda sebuah lokasi yang penting, berkesan bagi pengunjung (*landmark*), menyediakan navigasi yang unik menuju kota (*signage*), struktur jalan yang teratur (*path*), dan titik simpul kota (*node*) seperti alun-alun, simpang dan lain-lain.



Gambar I - 4 Struktur Smart Branding (Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)) Smart Branding merupakan sebuah inovasi dalam memasarkan suatu daerah sehingga mampu meningkatkan daya saing, serta mampu menarik partisipasi masyarakat baik dari dalam maupun luar daerah, pelaku bisnis, dan investor untuk mendorong percepatan

pembangunan daerah tersebut. Branding ini bukan hanya semata untuk membuat suatu kota menjadi terkenal tetapi juga untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Selain itu, smart branding juga bertujuan untuk mewujudkan penataan wajah Daerah Kota melalui optimalisasi sumber daya yang berpotensi sebagai *brand value* daerah.

3. Smart Economy

Sasaran : Mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *cashless society*.

Sub-dimensi Smart Economy:

a. Membangun Ekosistem Industri yang Berdaya Saing

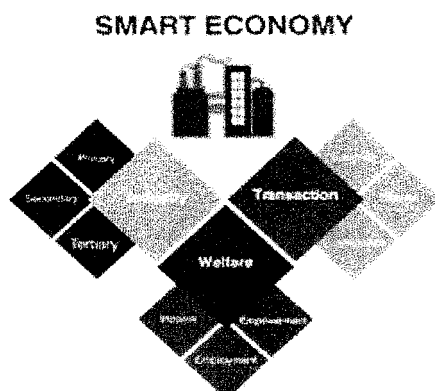
Membangun daya saing industri daerah pada leading sector industri tertentu yang terintegrasi antara industri primer (misalnya pertanian, perikanan, peternakan dan lain-lain), industri sekunder (misalnya manufaktur, pengolahan, packaging dan lain-lain), dan industri tersier (misalnya pasar produk daerah).

b. Mewudukan Kesejahteraan Rakyat

- Mengembangkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga (*income*);
- Program peningkatan penyerapan angkatan kerja (*employment*); dan
- Program pemberdayaan ekonomi masyarakat (*empowerment*).

b. Membangun Ekosistem Keuangan Daerah

- Membangun ekosistem transaksi keuangan digital untuk menjamin kelancaran pembayaran menuju masyarakat yang *cashless*;
- Mewujudkan masyarakat yang bankable dan memiliki akses terhadap permodalan; dan
- Mewujudkan ekosistem ekonomi digital dengan mendorong industri *e-commerce* dan *marketplace*.



Gambar I - 5 Struktur Smart Economy (Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN))

Smart Economy adalah ekonomi yang berbasis pada inovasi teknologi, efisiensi sumber daya, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial yang tinggi.

Smart Economy mengadopsi inovasi, inisiatif kewirausahaan baru, meningkatkan produktivitas dan daya saing dengan tujuan keseluruhan untuk meningkatkan kualitas hidup semua masyarakat. Lebih jauh lagi, smart economy bertujuan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang dapat memenuhi tantangan di era digitalisasi dan menghasilkan lebih banyak produk maupun layanan dengan lebih sedikit energi dan polusi, serta menciptakan manfaat sosial.

4. Smart Living

Sasaran : Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien.

Sub-dimensi Smart Living:

a. Harmonisasi Tata Ruang Wilayah

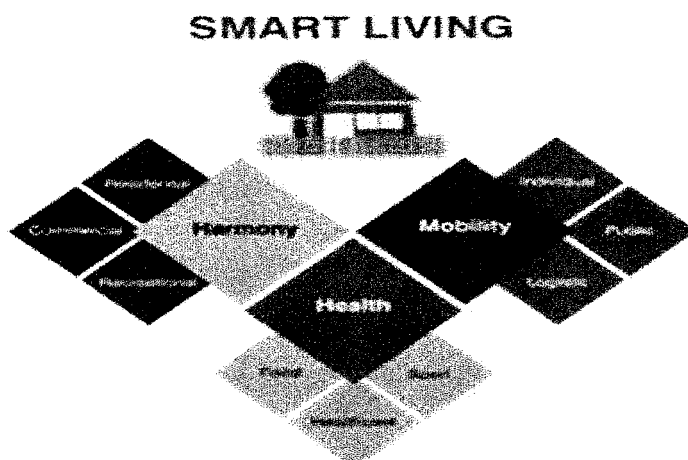
Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara lingkungan pemukiman (*residential*), lingkungan pusat kegiatan bisnis (*commercial*) yang didukung dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga (*recreational*).

b. Sarana Prasarana Kesehatan

Mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat (*food*), akses terhadap pelayanan kesehatan yang (*healthcare*), akses terhadap sarana dan prasarana olahraga (*sport*).

c. Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi

Transportasi merupakan aspek terpenting dalam proses distribusi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, sub-dimensi ini merupakan pilar penting yang memiliki indikator untuk mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik suatu daerah.



Gambar I - 6 Struktur Smart Living Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Smart living merupakan pembangunan tata kelola dalam peningkatan kualitas hidup yang bersifat dinamis. Dengan kata lain, smart living bertujuan untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalam suatu kota. Selain itu, Smart Living juga bergantung pada pendidikan, budaya, dan kedisiplinan masyarakat. Masyarakat atau warga kota yang terdidik akan memiliki budaya dan disiplin tinggi dalam menjalankan kehidupan cerdas yang saling menghormati hukum dan hak-hak sesama.

5. Smart Society

Sasaran : Mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi.

Sub-dimensi Smart Society:

a. Mewujudkan Interaksi Masyarakat Yang Efisien

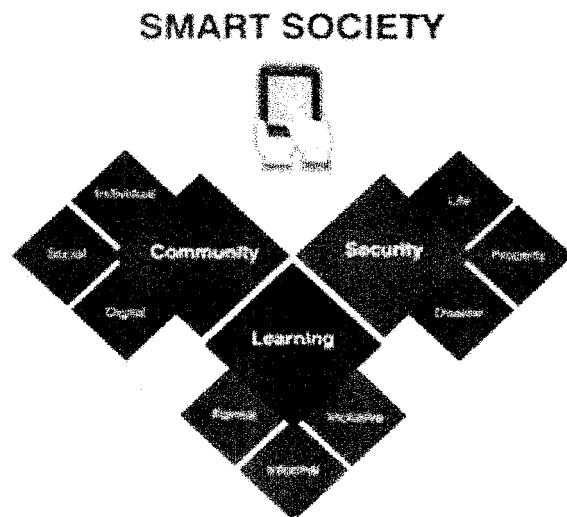
- Interaksi sosial masyarakat terjadi secara paralel antara individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok sosial, dan antar kelompok sosial, baik secara fisik maupun virtual (digital) dengan sasaran mewujudkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Contoh: berbagai program untuk mendukung berbagai kemajuan Smart City misalnya program-program kepemudaan, peningkatan keahlian UKM dan lain-lain.
- Pengembangan komunitas warga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara individu, sosial mampu memanfaatkan lingkungan digital dengan positif dan produktif. Misalnya edukasi tentang *marketplace* dan program lainnya yang mendukung terciptanya iklim positif di antara masyarakat.

b. Ekosistem Belajar yang Efisien

- Mewujudkan ekosistem pendidikan yang saling mendukung antara pendidikan formal dan non-formal untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan termasuk bagi masyarakat penyandang disabilitas; dan
- Membangun platform edukasi bagi masyarakat misalnya *smart school*, *smart campus*, *smart pesantren*, *smart training program* dan program pembelajaran lainnya.

c. Sistem Keamanan yang Mampu Melindungi Masyarakat

Mewujudkan suatu sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan bagi warga masyarakat baik perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan properti atau harta benda, dan keselamatan atas risiko bencana bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan alat kelengkapan pemerintah maupun teknologi sensor digital atau *Internet of Thing* (IoT)



Gambar I - 7 Struktur Smart Society (Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN))

Smart society merupakan pembangunan tata kelola masyarakat yang berfokus pada interaksi antar individu yang bergerak menuju ekosistem sosio teknis dengan dimensi fisik dan virtual dari kehidupan masyarakat kota yang semakin terjalin secara intensif. Selain itu, smart society juga menargetkan terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literacy yang tinggi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pemberdayaan interaksi masyarakat, pembangunan sistem pembelajaran, dan implementasi manajemen keamanan dan keselamatan sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat yang baik.

6. Smart Environment

Sasaran: Mewujudkan pembangunan yang baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Sub-dimensi Smart Environment:

a. Pengembangan Program Proteksi Lingkungan

- Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air, dan udara serta mengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara, misalnya dengan memanfaatkan teknologi sensor pada *Internet of Thing (IoT)*;
- Membangun ruang terbuka hijau;
- Melakukan restorasi sungai yang memiliki tingkat pencemaran tinggi; dan
- Mengendalikan polusi udara.

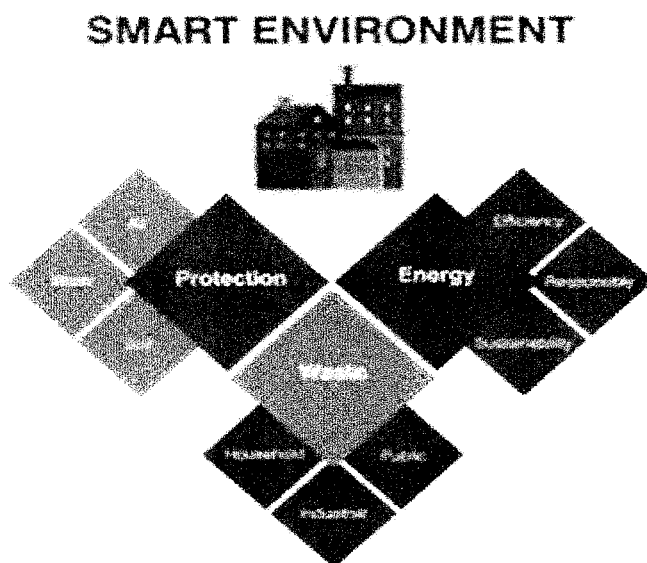
b. Tata Kelola Sampah dan Limbah

- Mengembangkan sistem tata kelola limbah atau sampah rumah tangga (*household*);
- Mengembangkan sistem tata kelola limbah industri (*industrial*);
- Mengembangkan sistem tata kelola limbah dan sampah publik (*public*); dan
- Menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan agar tidak mengganggu pemandangan, tidak merusak indra penciuman, dan menghindari banjir

akibat genangan sampah yang menyumbat saluran-saluran air pembuangan limbah atau sirkulasi air residensial serta ketersediaan sistem sanitasi rumah tangga, industri dan publik yang baik dan bertanggung-jawab.

c. Ketiga, mengembangkan tata kelola energi yang bertanggung jawab.

Penggunaan sumber daya alam termasuk energi merupakan hal yang tidak bisa diindari, namun dapat dikendalikan sehingga tidak memberikan dampak kerusakan alam yang besar. Hal ini dapat dicapai melalui pemanfaatan energi yang efisien dan bertanggung jawab dan pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan (*environmentally friendly*) dan berkelanjutan (*sustainable*) serta terjangkau bagi masyarakat. Misalnya pemanfaatan limbah/sampah sebagai biogas, energi surya, tenaga angin, biomassa (tumbuhan dan hewan) dan alternatif lainnya.

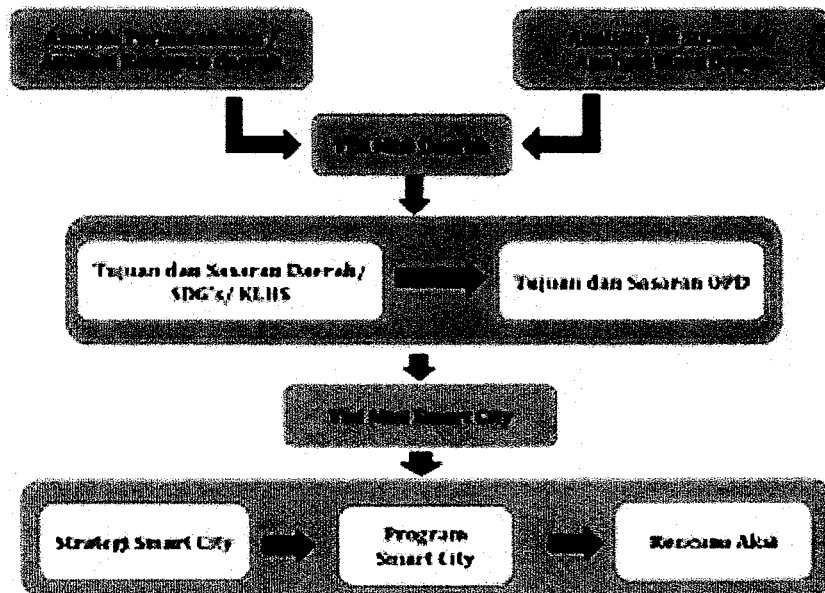


Gambar I - 8 Smart Environment (Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN))

Smart environment merupakan pembangunan lingkungan hidup yang cerdas bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan yang meliputi perlindungan lingkungan, tata kelola sampah dan limbah, serta pemanfaatan energi yang berkelanjutan. Lingkungan hidup yang cerdas diartikan juga sebagai lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik lingkungan yang bersih tertata, serta ruang hijau terbuka yang stabil. Smart environmen menekankan pada lingkungan hidup yang berkelanjutan, artinya pengelolaan sumber daya dan pelestarian lingkungan manfaatnya bisa dinikmati untuk generasi sekarang hingga mendatang.

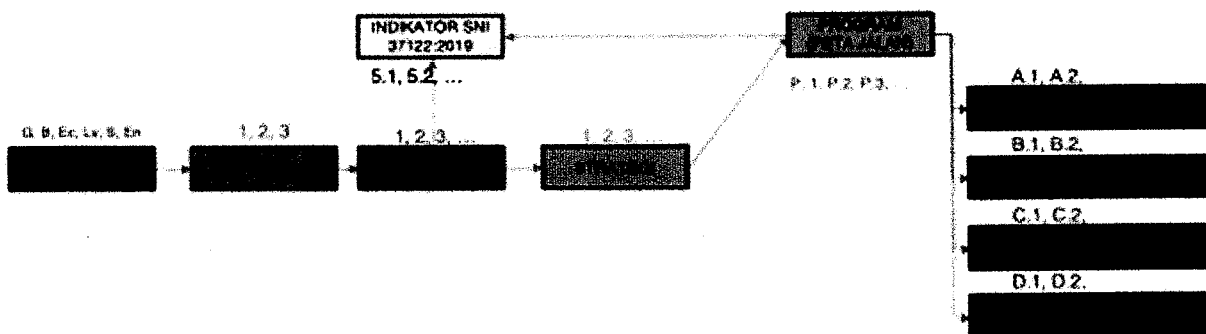
Pengembangan smart city di Kabupaten Maros tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen-dokumen perencanaan ini merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal jika tidak saling menopang satu sama lain. Dokumen masterplan smart city Kabupaten Maros merupakan turunan dari visi dan misi daerah dalam menentukan rencana aksi dan inovasi

kegiatan. Hal ini tentunya akan menyesuaikan dengan kebutuhan, permasalahan, dan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Maros agar pengembangan smart city dapat direalisasikan.



Gambar I - 9 Keterkaitan Antara Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Smart City (Sumber: Analisis Pemetaan Regulasi Terkait Perencanaan Pembangunan dan Smart City)

RPJMD Kabupaten Maros 2021 merupakan rencana induk pembangunan daerah yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, implementasi dari keenam dimensi smart city harus bernaung pada program dan kegiatan yang dirancang di RPJMD. Selain itu, renstra OPD di Kabupaten Maros juga menjadi ujung tombak dalam teknis pelaksanaan smart city.



Gambar I - 10 Kerangka Keterkaitan antara Sasaran Smart City dengan RPJMD

Pada tahap akhir dari implementasi masterplan smart city, terdapat empat diferensiasi dalam pelaksanaan rencana aksi. Pertama, rencana aksi kebijakan, rencana aksi ini terkait regulasi atau dasar hukum yang diperlukan dalam upaya implementasi smart city. Yang kedua, terkait rencana aksi infrastruktur yang mencanangkan sarana dan prasarana fisik yang perlu dibangun atau dikembangkan pada proses pengembangan smart city. Ketiga, rencana aksi aplikasi, yang berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur digital seperti web, aplikasi, atau sistem lainnya untuk

mendukung program kota cerdas. Rencana aksi yang terakhir, yaitu, literasi. Rencana aksi ini menjadi bagian vital dalam pengembangan smart city. Sebaik apapun inisiasi dan inovasi yang ada, tanpa adanya partisipasi dari masyarakat hal tersebut belum menjadi kebijakan yang membangun dan akhirnya program akan mati suri. Dengan demikian, imbauan pada masyarakat merupakan salah satu elemen terpenting dalam pengembangan smart city.

BAB II. ARAH PEMBANGUNAN SMART CITY KABUPATEN MAROS

Smart city pada dasarnya adalah sebuah pendekatan baru dalam melaksanakan pembangunan daerah. Dalam pengembangan smart city, berbagai inovasi dimunculkan untuk mewarnai program dan kegiatan pembangunan. Tujuannya adalah untuk memberikan nilai tambah bagi berbagai program dan kegiatan pembangunan tersebut. Nilai tambah bisa muncul dalam berbagai bentuk, antara lain peningkatan produktivitas, akuntabilitas, transparansi, kemudahan, kecepatan, luasan cakupan, dan sebagainya.

Karena smart city lebih merupakan pendekatan baru dan bukan mendefinisikan program-program baru, maka seyogyanya arah pembangunan smart city juga didasarkan pada arah pembangunan daerah. Kesamaan arah ini penting agar implementasi smart city dapat selaras dengan pembangunan daerah, sehingga tujuan memberikan dampak nilai tambah dapat diwujudkan. Dalam kaitannya dengan hal ini, perumusan visi, misi, dan sasaran smart city sebagai landasan pengembangan smart city perlu dikaitkan dengan visi misi pembangunan daerah.

Mengaitkan visi, misi, dan sasaran smart city dengan visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah akan memastikan koherensi keduanya. Dari visi, misi, dan sasaran yang selaras, selanjutnya akan dapat ditentukan inovasi-inovasi terhadap berbagai program pembangunan secara selaras pula. Penetapan arah pembangunan smart city untuk Kabupaten Maros inilah yang akan dijelaskan dalam Bab II ini.

Pada Bab II ini akan diuraikan tentang arah pembangunan smart city Kabupaten Maros. Subbab II.1 menjelaskan tentang visi, misi, dan sasaran smart city sebagai titik tolak pembangunan smart city, dan Subbab II.2 mendeskripsikan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan smart city di Kabupaten Maros.

II.1. Visi, Misi, dan Sasaran Smart City Kabupaten Maros

II.1.1. Visi dan Misi Smart City

Sebagaimana arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 86 tahun 2017, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan yang merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Seperti tercantum dalam Bab V

RPJMD Kabupaten Maros 2021-2026, visi Pemerintah Kabupaten Maros 2021-2026 adalah:

“Maros Sejahtera, Religius, dan Berdaya Saing”

Kata “sejahtera” memiliki makna bahwa masyarakat Maros dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan serta mendapatkan pelayanan dasar berupa pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan yang layak, layanan sosial, dan perlindungan baik dari aspek keamanan dan ketertiban maupun aspek kebencanaan.

“Religius” memiliki makna terciptanya kondisi tata hubungan masyarakat yang serasi dan selaras berdasarkan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan norma hukum.

Sementara itu kata “berdaya saing” berarti terwujudnya kondisi masyarakat dan wilayah Kabupaten Maros yang memiliki kemampuan kompetitif dan ketangguhan untuk menghadapi persaingan global pada masa yang akan datang yang meliputi infrastruktur, perekonomian, sumber daya manusia, iklim usaha, dan tata kelola birokrasi.

Berdasarkan visi Kabupaten Maros maka disusunlah visi smart city Kabupaten Maros, yaitu:

“Menuju Kabupaten Maros yang Sejahtera, Religius, dan Berdaya Saing dengan Kecerdasan yang Harmonis”

Visi smart city Kabupaten Maros diturunkan langsung dari visi Kabupaten Maros. Visi ini menjelaskan cara pencapaian visi Kabupaten Maros. Frasa “kecerdasan yang harmonis” yang menjadi ciri smart city disematkan kepada visi daerah. Kata “kecerdasan” merupakan padanan kata “smart”, dan kata “harmonis” menjelaskan suatu bentuk hubungan yang ideal yang terjadi antara banyak aspek. Secara implisit, kata “harmonis” juga mengandung pandangan yang menyeluruh (holistik) terhadap semua aspek yang terkait. Bila kedua frasa tersebut digabung, “kecerdasan yang harmonis” menggambarkan kondisi yang dicirikan dengan sifat cerdas, yang di dalamnya terkandung banyak aspek yang diikat dalam relasi-relasi yang ideal dan menyeluruh. Kondisi seperti inilah yang akan diwujudkan dalam rangka menjalankan pembangunan daerah di Kabupaten Maros, untuk mewujudkan visi dan tujuannya.

Bila didalami lebih jauh, kata “kecerdasan” dalam visi smart city Kabupaten Maros, mencerminkan kehendak untuk mencapai kondisi yang lebih baik melalui cara-cara baru yang kreatif, inovatif, dan memberikan nilai tambah yang nyata. Kecerdasan adalah sebuah atribut yang sering dikaitkan dengan penggunaan teknologi (TIK) yang menjadi penciri masa depan.

Tidak heran bila kata “smart” dalam smart city sering diasosiasikan dengan pemanfaatan TIK dalam pembangunan. Pandangan ini tidak keliru, namun menganggap kecerdasan adalah produk teknologi tidaklah tepat. Kecerdasan lebih merupakan hasil dari proses kreatif dan inovatif untuk mencapai tujuan. Kecerdasan lebih terkait dengan ide atau gagasan, dan dapat diterapkan pada berbagai hal (metode, cara, teknik, ataupun tool atau perangkat yang digunakan). Karena berada pada level ide/gagasan, maka sebenarnya kecerdasan dapat tetap muncul meskipun tanpa adanya keterlibatan teknologi (TIK). Ketika TIK hadir, maka perannya adalah sebagai

akselerator bagi implementasi ide atau gagasan baru tersebut. TIK memberikan kecepatan, ketepatan, kemudahan, keluasan cakupan, dan berbagai kelebihan lainnya, yang pada akhirnya berkontribusi dalam mewujudkan “kecerdasan”.

Kata “harmonis” menunjukkan adanya keselarasan yang terjadi ketika berbagai elemen saling berinteraksi. Dalam konteks smart city, keselarasan dibangun di dalam enam dimensi smart city yang menunjukkan keragaman fokus dan perhatian terhadap proses-proses pembangunan yang dijalankan (intra-dimension), dan dicoba diwujudkan juga antar dimensi (extra-dimension). Dengan cirinya masing-masing yang heterogen, keenam dimensi ini perlu dipandang dalam sebuah kerangka yang komprehensif dan holistik. Komprehensivitas dan keutuhan pandangan ini diperlukan untuk relasi antar elemen/dimensi yang harmonis. Tanpa pandangan yang utuh, persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk membentuk relasi yang harmonis tidak akan dapat diidentifikasi dengan baik. Pada akhirnya harmoni atau keselarasan adalah prasyarat untuk membangun semua aspek smart city secara bersama dan tetap mempertahankan keseimbangan. Dalam banyak kasus, harmoni atau keselarasan ini menjadi strategi pembangunan smart city dengan peluang keberhasilan yang paling tinggi.

Pada akhirnya frasa “kecerdasan yang harmonis” dalam visi smart city Kabupaten Maros dapat dipahami sebagai pendekatan inovatif yang didorong oleh pemanfaatan teknologi (TIK) dalam proses-proses pembangunan yang dijalankan secara harmonis.

Adapun misi smart city Kabupaten Maros disusun berdasarkan visi smart city. Misi smart city menjelaskan secara mendasar bagaimana visi tersebut dicapai. Misi smart city Kabupaten Maros juga diselaraskan dengan misi Kabupaten Maros (tercantum dalam RPJMD Kabupaten Maros 2023-2026). Rumusan kedua misi ini ditampilkan dalam Tabel II-1.

Tabel II - 1 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Maros dan misi smart city Kabupaten Maros

Isu Strategis Daerah	Misi Kabupaten Maros RPJMD 2021-2026	Misi Smart City Kabupaten Maros	Dimensi Smart City
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efisien dan Akuntabel	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik	Digitalisasi penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik	Smart Governance
	2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia	Meningkatkan kompetensi dan literasi SDM dalam menyongsong era informasi	Smart Society
Indeks Pembangunan Manusia Daerah yang Masih Perlu Ditingkatkan			

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Belum Maksimal	3. Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif	Memperluas pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar melalui pemanfaatan teknologi	Smart Living
Peningkatan Kapasitas UMKM dalam Ekonomi Daerah	4. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal melalui cara-cara inovatif	Smart Branding, Smart Economy & Smart Society
Belum meratanya pembangunan infrastruktur daerah	5. Memantapkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan wilayah	Mengakselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendorong tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif secara merata	Smart Economy & Smart Living
Angka IKLH yang masih dapat ditingkatkan dan RTRW	6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan literasi	Smart Environment & Smart Living

II.1.2. Sasaran Smart City Kabupaten Maros

Untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembangunan, maka ditetapkanlah sasaran-sasaran pembangunan. Sasaran pembangunan adalah kondisi-kondisi yang ingin dicapai melalui program-program pembangunan yang dijalankan. Dalam konteks smart city, sasaran-sasaran smart city dikelompokkan ke dalam masing-masing dimensi dan sub-dimensi smart city.

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa pembangunan smart city pada dasarnya bertujuan menguatkan dan mengakselerasi pembangunan daerah, sehingga ketika menetapkan sasaran-sasarannya, perlu diperhatikan keselarasan antara sasaran-sasaran smart city dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penyelarasan ini dicapai dengan melakukan pemetaan antara sasaran-sasaran pembangunan daerah ke dalam dimensi-dimensi smart city, pemetaan ini akan menghasilkan relasi yang jelas antara sasaran-sasaran pembangunan daerah dengan sasaran-sasaran smart city.

Relasi yang tegas inilah yang akan menjamin program-program smart city berada dalam koridor program yang digariskan di dalam RPJMD.

Tabel II - 2 Sasaran Smart City Kabupaten Maros dan Keterkaitannya Dengan RPJMD

Dimensi	Sub-Dimensi	Sasaran	Keterkaitan dengan RPJMD
Smart Governance	Layanan Publik	Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas	Sasaran-sasaran ini sesuai dan mendukung tercapainya Tujuan ke-1 RPJMD Kab Maros 20212026
	Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	
	Perancangan Kebijakan	Terimplementasinya regulasi untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan publik yang baik	
Smart Branding	Pariwisata	Meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah terhadap PDRB	RPJMD Kab Maros tidak menyebutkan secara eksplisit sasaran-sasaran yang terkait promosi dan pemasaran, namun semuanya mengarah pada peningkatan nilai tambah ekonomi berbasis keunggulan sumber daya daerah (Tujuan ke-4).
	Daya Saing Bisnis	Meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah terhadap PDRB	
	Wajah (Tampilan) Kota	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi masyarakat	
Smart Economy	Ekosistem Industri	Meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah terhadap PDRB	Dalam RPJMD Kab Maros 20212026, sasaran sektor ekonomi tidak dibahas secara terinci, namun semua disatukan dalam kerangka ekonomi berbasis keunggulan sumber daya daerah (Tujuan ke-4). Nilai tambah yang diperoleh kemudian digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
	Kesejahteraan Masyarakat	Menurunnya jumlah pengangguran	
		Terkendalinya laju inflasi	
		Menurunnya jumlah masyarakat miskin	
Ekosistem Transaksi Keuangan	Meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah terhadap PDRB		
Dimensi	Sub-Dimensi	Sasaran	Keterkaitan dengan RPJMD
Smart Living	Harmonisasi Tata Ruang	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi masyarakat	Masalah tata ruang terkait dengan fungsinya sebagai penunjang aktifitas

		Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat	ekonomi masyarakat (sesuai dengan Tujuan ke-5 RPJMD Kab Maros) dan pemenuhan standar pelayanan minimum bagi masyarakat (sesuai dengan Tujuan ke-3)
	Kesehatan	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Sesuai dengan Tujuan ke-2, terkait dengan kualitas SDM
	Transportasi	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa kebutuhan konsumsi masyarakat	Dalam RPJMD Kab Maros, masalah transportasi dipandang sebagai elemen penting untuk mendukung ketersediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat (sesuai dengan Tujuan ke-3)
Smart Society	Interaksi Masyarakat	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemberdayaan gender	Semua aspek dalam Smart Society mengarah pada Tujuan ke-2 RPJMD Kab Maros yang terkait dengan peningkatan kualitas SDM
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan keagamaan	
	Ekosistem Belajar dan Pendidikan	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	
	Keamanan Masyarakat	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	
Smart Environment	Proteksi Lingkungan	Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan	Sesuai dengan Tujuan ke-6 RPJMD Kab Maros
		Menurunnya resiko bencana	Sesuai dengan Tujuan ke-7 RPJMD Kab Maros
	Pengelolaan Sampah dan Limbah	Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan	Sesuai dengan Tujuan ke-6 RPJMD Kab Maros
	Tata Kelola Energi	Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat (khususnya dalam hal energi)	Sesuai dengan Tujuan ke-3 RPJMD Kab Maros

II.2 Indikator Utama Smart City Kabupaten Maros

Indikator-indikator utama smart city Kabupaten Maros diturunkan dari indikator-indikator pembangunan yang terdapat dalam dokumen RPD. Usulan indikator-indikator smart city ditampilkan pada Tabel II-4.

Tabel II - 3 Indikator-indikator utama smart city Kabupaten Maros

Dimensi	Sub-Dimensi	Sasaran	Indikator-Indikator Utama	Indikator SNI 37122:2019
Smart Governance	Layanan Publik	Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat; Nilai SAKIP; Indeks SPBE	10.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk

	Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring
	Perancangan Kebijakan	Terimplementasinya regulasi untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan publik yang baik		6.3 Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)
Smart Branding	Pariwisata	Meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah terhadap PDRB	Persentase pertumbuhan kontribusi lapangan usaha daerah; PDRB per kapita	14.1. Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring
	Daya Saing Bisnis	Meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah terhadap PDRB		9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari

Dimensi	Sub-Dimensi	Sasaran	Indikator-Indikator Utama	Indikator SNI 37122:2019
				pendapatan sumber sendiri
	Wajah (Tampilan) Kota	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi masyarakat		10.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring
Smart Economy	Ekosistem Industri	Meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah terhadap PDRB	Persentase pertumbuhan kontribusi lapangan usaha daerah; PDRB per kapita	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri
	Kesejahteraan Masyarakat	Menurunnya jumlah pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri
		Terkendalnya laju inflasi	Laju inflasi	
		Menurunnya jumlah masyarakat miskin	Angka kemiskinan	

Ekosistem Transaksi Keuangan	Meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah terhadap PDRB	Persentase pertumbuhan kontribusi lapangan usaha daerah; PDRB per kapita	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri 9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktor elektronik
------------------------------	---	--	---

Dimensi	Sub-Dimensi	Sasaran	Indikator-Indikator Utama	Indikator SNI 37122:2019
Smart Living	Harmonisasi Tata Ruang	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi masyarakat	Indeks kualitas layanan infrastruktur	6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring
		Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (terkait dengan pelayanan minimum masyarakat)	
	Kesehatan	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks kesehatan	11.1 Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan
	Transportasi	Meningkatnya ketersediaan barang dan jasa kebutuhan konsumsi masyarakat	Indeks harga konsumen	15.5 Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (real-time) yang dapat diakses publik
Smart Society	Interaksi Masyarakat	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender	6.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk 6.3 Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan keagamaan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keagamaan	

Dimensi	Sub-Dimensi	Sasaran	Indikator-Indikator Utama	Indikator SNI 37122:2019
				dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)
	Ekosistem Belajar dan Pendidikan	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks pendidikan	6.1. Persentase populasi kota dengan kecakapan profesional di lebih dari satu bahasa
	Keamanan Masyarakat	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Tingkat kriminalitas/gangguan keamanan dan ketertiban umum	17.1 Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan 6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring
Smart Environment	Proteksi Lingkungan	Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan	Indeks kualitas air; Indeks kualitas lahan	12.4 Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota
		Menurunnya resiko bencana	Indeks ancaman bencana	17.1 Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan
Dimensi	Sub-Dimensi	Sasaran	Indikator-Indikator Utama	Indikator SNI 37122:2019
	Pengelolaan Sampah dan Limbah	Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan	Indeks kualitas air; Indeks kualitas lahan	16.4. Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota

	Tata Kelola Energi	Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat (khususnya dalam hal energi)	Indeks kepuasan masyarakat (terhadap layanan minimum)	<p>7.1. Persentase energi listrik dan energi termal yang dihasilkan dari pengolahan air limbah, limbah padat dan pengolahan limbah cair lainnya serta sumber daya limbah panas lainnya, sebagai bagian dari total bauran energi kota untuk tahun tertentu.</p> <p>7.4. Persentase listrik kota yang diproduksi menggunakan sistem produksi listrik desentralisasi</p>
--	--------------------	--	---	---

BAB III. STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY KABUPATEN MAROS

Pembangunan smart city adalah sebuah upaya yang memiliki lingkup luas dan berdurasi lama. Visi, tujuan, dan sasaran smart city yang telah dijelaskan pada Bab II menjadi landasan untuk menyusun program dan kegiatan smart city di Kabupaten Maros, namun sebelumnya perlu dirumuskan terlebih dahulu strategi pembangunan yang akan dijalankan. Strategi ini akan menentukan bagaimana visi dan tujuan smart city akan dicapai melalui pilihan-pilihan arah, fokus, dan penekanan terhadap sektor-sektor yang akan dikembangkan, metode yang dipilih, dan jenis-jenis kegiatan yang akan dijalankan.

Basis penentuan strategi pembangunan smart city adalah kondisi riil Kabupaten Maros. Secara lebih spesifik, strategi smart city dapat diturunkan dari analisis kondisi saat ini dan analisis SWOT, yang di dalamnya sudah termuat strategi-strategi spesifik terkait dengan faktor-faktor SWOT yang teridentifikasi. Strategi SWOT pada masing-masing dimensi smart city kemudian disarikan untuk dirumuskan menjadi strategi umum yang digunakan sebagai platform dalam merancang program dan kegiatan smart city nantinya.

III.1 Strategi Smart Governance

Strategi untuk Smart Governance dijabarkan ke dalam strategi untuk ketiga subdimensinya: layanan publik, manajemen birokrasi, dan kebijakan publik. Diawali dengan analisis SWOT yang mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk ketiga aspek dimensi Smart Governance tersebut, selanjutnya strategi SO, WO, ST, dan WT dirumuskan dirumuskan dalam arahan strategi komprehensif untuk masing-masing sub-dimensi pada tabel di bawah ini.

Tabel III - 1 Arahannya Strategi untuk Smart Governance

Sub-dimensi	Arahannya Strategi
Pelayanan Publik	Mendekatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi
Manajemen Birokrasi	Penguatan kapasitas aparat birokrasi untuk menciptakan manajemen birokrasi yang lebih efektif
Efisiensi kebijakan publik	Memfaatkan teknologi yang berkembang untuk membangun pemerintahan yang lebih efisien

III.2 Strategi Smart Branding

Strategi untuk Smart Branding dijabarkan ke dalam strategi untuk ketiga subdimensinya: ekosistem pariwisata, daya saing bisnis daerah, dan wajah kota. Diawali dengan analisis SWOT yang mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk ketiga aspek dimensi Smart Branding tersebut, selanjutnya strategi SO, WO, ST, dan WT dirumuskan dirumuskan dalam arahan strategi komprehensif untuk masing-masing sub-dimensi pada tabel di bawah ini.

Tabel III - 2 Arahannya Strategi untuk Smart Branding

Sub-dimensi	Arahannya Strategi
Pariwisata	Pengembangan pariwisata minat khusus (tinggal lama, virtual tourism) melalui penguatan kapasitas kelembagaan pariwisata pada tingkat masyarakat
Bisnis	Menarik minat bisnis di Maros melalui penyediaan peta potensi investasi dan pengembangan iklim investasi yang kondusif
Wajah Kota	Membangun iklim tata ruang yang kondusif melalui pembangunan yang taat pada aturan tata ruang

III.3. Strategi Smart Economy

Strategi untuk Smart Economy dijabarkan ke dalam strategi untuk ketiga subdimensinya: daya saing industri (lokal), kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan. Diawali dengan analisis SWOT yang mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk ketiga aspek dimensi Smart Economy tersebut, selanjutnya strategi SO, WO, ST, dan WT dirumuskan dirumuskan dalam arahan strategi komprehensif untuk masing-masing sub-dimensi pada tabel di bawah ini.

Tabel III - 3 Arahan Strategi untuk Smart Economy

Sub Dimensi	Arahan Strategi
Daya Saing industri	Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas produk ekspor melalui Kerjasama dengan stakeholder yang terakit
Kesejahteraan	Peningkatan kapasitas sektor pertanian untuk menghasilkan sumber pangan berkualitas dalam pemenuhan kebutuhan pangan local dan menjadi pemasok pangan bagi kota Makassar
	Menciptakan gerakan mencintai produk local untuk peningkatan konsumsi produk lokal
Transaksi keuangan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk menciptakan transaksi non tunai

III.4. Strstegi Smart Living

Strategi untuk Smart Living dijabarkan ke dalam strategi untuk ketiga subdimensinya: harmonisasi tata ruang, layanan kesehatan, dan layanan transportasi. Diawali dengan analisis SWOT yang mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk ketiga aspek dimensi Smart Living tersebut, selanjutnya strategi SO, WO, ST, dan WT dirumuskan dirumuskan dalam arahan strategi komprehensif untuk masing-masing subdimensi pada tabel di bawah ini.

Tabel III - 4 Arahan Strategi untuk Smart Living

Sub Dimensi	Arahan Strategi
Tata ruang	Penguatan kapasitas pemerintah desa untuk pengembangan data dan mempercepat penanganan Kawasan tidak layak huni
Kesehatan	Peningkatan sarana dan prasaran kesehatan modern dengan basis teknologi untuk pelayanan penduduk Maros dan meraih konsumen diluar Maros
Transportasi	Revitalisasi sarana dan prasarana transportasi publik

III.5. Strstegi Smart Society

Strategi untuk Smart Society dijabarkan ke dalam strategi untuk ketiga subdimensinya:

interaksi masyarakat, layanan pendidikan, dan keamanan masyarakat. Diawali dengan analisis SWOT yang mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk ketiga aspek dimensi Smart Society tersebut, selanjutnya strategi SO, WO, ST, dan WT dirumuskan dalam arahan

strategi komprehensif untuk masing-masing sub-dimensi pada tabel di bawah ini:

Tabel III - 5 Arahan Strategi untuk Smart Society

Sub Dimensi	Arahan Strategi
Interaksi sosial	Revitalisasi kearifan local masyarakat untuk pengembangan interaksi sosial yang sehat dalam masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis kelembagaan tingkat desa
Learning	Penguatan kapasitas berbagai Lembaga yang terkait dengan Pendidikan untuk gerakan digitalisasi sekolah
Keamanan	Penguatan kapasitas masyarakat desa dalam mencegah terjadinya bencana dan menghadapi kejadian bencana (Desa tanggap bencana)

III.6. Strategi Smart Environment

Strategi untuk Smart Environment dijabarkan ke dalam strategi untuk ketiga subdimensinya: proteksi lingkungan, tatakelola limbah dan sampah, dan tatakelola energi. Diawali dengan analisis SWOT yang mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk ketiga aspek dimensi Smart Environment tersebut, selanjutnya strategi SO, WO, ST, dan WT dirumuskan dalam arahan strategi komprehensif di masing-masing sub-dimensi pada tabel di bawah ini.

Tabel III - 6 Arahan Strategi untuk Smart Environment

Sub Dimensi	Arahan Strategi
Proteksi lingkungan	Pengarusutamaan perlindungan lingkungan berbasis masyarakat melalui kolaborasi berbagai stakeholder
Pengelolaan sampah	Memperkuat gerakan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat melalui Kerjasama dengan berbagai stakeholder
Energi terbarukan	Menciptakan Gerakan pemanfaatan energi terbarukan berbasis masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder

BAB IV. RENCANA AKSI SMART CITY KABUPATEN MAROS

Implementasi smart city merupakan upaya untuk menyelesaikan masalah di era modern dengan cara modern yang lebih inovatif. Hal ini diharapkan mampu membantu berbagai kegiatan yang ada di masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi. Terdapat tiga tujuan utama dalam pengembangan Smart City di daerah. Pertama, Smart City adalah sebuah konsep yang diterapkan oleh sistem pemerintahan daerah dalam mengelola kehidupan masyarakat di perkotaan. Kedua, konsep Smart City mensyaratkan pengelolaan daerah terhadap segala sumber daya yang efektif dan efisien. Ketiga, Smart City diharapkan mampu menjalankan fungsi

penyedia informasi secara tepat kepada masyarakat dan mampu mengantisipasi kejadian yang tak terduga.

Dalam menentukan rencana aksi, susunan ini disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pengembangan kota cerdas. Segala kebijakan, aktivitas, tujuan, hingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang perlu dan akan dilakukan terkait kebutuhan dalam penyelenggaraan program dan inovasi yang akan dilakukan. Rencana aksi Smart City memiliki 4 (empat) aspek Rencana, yaitu :

1. Pengembangan kebijaksanaan dan kelembagaan Smart City;
2. Rencana pembangunan infrastruktur pendukung Smart City;
3. Rencana pengembangan aplikasi dan perangkat lunak pendukung Smart City;
4. Rencana penguatan literasi Smart City.

IV.1. Rencana Aksi Smart Governance

Tabel IV - 1 Rencana Aksi Jangka Panjang Smart Governance

Sub Dimensi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun						
			Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Inovasi Jangka Panjang Dimensi	MAROS SMART VILLAGE	Jangka Panjang	2025	Tower ,Radio wireless,Akses Point dan Fiber Optik	2027	bandwith	2026	Melakukan Bimbingan terhadap tenaga pengelolah internet (pendampingan)	2026

Tabel IV - 2 Rencana Aksi Jangka Menengah Smart Governance

Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun									
			Tahun	Infrastruktur pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun			
Layanan Publik	Mendekatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Apikasi Smart BPHTB diakses hanya di laptop melainkan juga dapat diakses pada smartphone android dan IOS sehingga masyarakat dapat mengupload data-data yang dibutuhkan dan dapat	Jangka Menengah	Pengembangan Kebijakan & Kelambagaan	Peraturan Bupati	2023	Jaringan, Server, Komputer, dan Tenaga Pengolah Data	2024	Data dan Aplikasi	2024	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023

Program BPJS Desa Mandiri	Jangka Menengah	Memformalkan dengan menetapkan Program BPJS desa Mandiri sebagai Inovasi Layanan Daerah Untuk Aparat Pemerintah Desa	2023	Layanan BPJS Kesehatan, Kartu Anggota Kepesertaan	2023	Aplikasi BPJS Kesehatan	2023	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023
TAKE " Kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (Take) Kabupaten Maros "	Jangka Menengah	Memformalkan dengan menetapkan Kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) sebagai Inovasi Layanan Daerah Untuk Pemerintah di Desa dalam penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)	2023	Laptop, Komputer	2023	Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa	2023	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023
TAKERDES "Tanggap Kerja sama dan Penataan antar Desa"	Jangka Menengah	Menyiapkan Regulasi Kerja sama dan Penataan Desa, Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja sama	2022	Laptop, Komputer	2023	-	-	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023

Sub-Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun	Tahun	Infrastruktur pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Pengukuran Uraian	Tahun
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun						
			Desa, tanggal 21 April 2022							
		Jangka Menengah	Peraturan Bupati	2023	Jaringan, Server, Komputer, dan Tenaga Pengolah Data	2025	Data dan Aplikasi Berbasis WEB	2026	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2025
			INDEK'S (Informasi Data Kependudukan Maros) Layanan Akses Elemen Data Agregat kependudukan berbasis Web on line							

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun Pengembangan Kebijakan & Lembaga	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Pengukuran Literasi	Tahun
	birokrasi yang lebih efektif	diperuntukkan khusus lembaga dan instansi Non Vertikal.	Jangka Menengah	Penyusunan regulasi terkait layanan administrasi kepegawaian dan e-SKP	2023	Tenaga Pengolah Data	2023	Aplikasi Si ASN dan eSKP	2023	Pelatihan dan sosialisasi bagi ASN, Kasubag dan atau pelaksana subbagian Kepegawaian OPD	2023
		Replikasi Aplikasi dalam bentuk Pelayanan Administrasi Kepegawaian Online (Layananlayanan Kepegawaian) dan Sistem Kinerja Pegawai (SKP) sehingga ASN mudah mengakses segala jenis data-data ASN dari semua OPD, seperti cuti, KGB, kenaikan Pangkat, data Diklat atau Bimtek melalui updating data secara berkala dari tiap OPD				Replikasi dan pengembangan aplikasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Online (simASN) yang diintegrasikan dengan siASN (aplikasi BKN) dan Sistem Kinerja Pegawai (SKP)					

Tabel IV - 3 Rencana Aksi Jangka Pendek Smart Governance

Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun				Penguatan Literasi	Tahun		
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun			Perangkat Lunak Pendukung	Tahun
Layanan Publik	Mendekatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Aplikasi SIMDA berbasis WEB agar terkoneksi dengan SKPD lain	Jangka Pendek	Perda Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan menyiapkan semua regulasi yang berhubungan dengan penatausahaan BMD	2023	SERVER DAN ROUTER	2023	APLIKASI DAN WEB yang terkoneksi dengan PD Lain	2023	Keterampilan SDM dalam mengoperasikan perangkat Aplikasi SIMDA	2023

Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun				Penguatan Literasi	Tahun			
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun			Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	
		Melakukan upgrade pada Aplikasi SIMPEL khususnya pada pengambilan Nomor antrian secara online	Jangka Pendek	MOU	2022	Jaringan, Laptop	2023	Server Tambahan	2023	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023	
		Melakukan sosialisasi SOS ke tingkat kecamatan dan kelurahan	Jangka Pendek	MOU, SK Kepala Dinas	2022	-	-	-	-	-	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023

<p>Nama: SIPUTRI (Sistem Jemput Dokumen Perizinan) Sasaran Ke Masyarakat di desa terpencil. Sistem pelayanan penjemputan dokumen perizinan ke desa terpencil yang lakukan secara terjadwal</p>	Quick Win	Memformalkan dengan menetapkan SIPUTRI sebagai Pelayanan Perizinan di Daerah	2023	Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik (Mobil Pelayanan, Laptop, printer dll)	2023	Jaringan internet dan aplikasi OSS	2023	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023
<p>OM DUK (Ojek Melayani Dokumen Kependudukan) Layanan berbasis Covid-19, Antar Jemput Berkas permohonan dan dokumen adminduk. (Berbasis Online)</p>	Quick Win	Memformalkan dengan menetapkan INOVASI OM DUK sebagai Inovasi Daerah, serta MOU pemberdayaan Ojek Lokal.	2023	Pemberdayaan petugas khusus dan Sarana transportasi	2023	Aplikasi Layanan On Line	2023	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023
<p>TANDU (Tanggap Layanan terhadap permintaan perekaman KTP-el bagi penduduk sulit akses, disabilitas dan yang terkena dampak bencana alam/sosial. PAKINTAKI (Pelayanan Administrasi Kependudukan terintegrasi keliling) di Kecamatan, Desa dan kelurahan.</p>	Quick Win	Memformalkan dengan menetapkan INOVASI TANDU sebagai Inovasi Daerah	2023	Sarana transportasi dan Perlengkapan Perekaman	2023	Aplikasi Layanan On Line	2023	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023
<p>API (Aplikasi Pencari Issue)</p>	Quick Win	Regulasi terkait: perbup	2023	Programmer/IT Consultant	2023	Software sesuai dibutuhkan	2023	Sosialisasi antar OPD	2023

Bidang	Strategi	Inovasi	Rencana 5/5 Tahun				Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
			Perencanaan Kefinansian & Kelembagaan	Tahun	Status Inovasi	Infrastruktur Pendukung						
		E-Spot (Penyediaan Titik Hotspot gratis di Desa)	Menyediakan regulasi terkait Penyediaan akses internet gratis, menyiapkan data desa lokasi	2023	Quick Win	2023	Tower ,Radio wireless,Akses Point dan Fiber Optik	-	2023, 2024 dan 2025	Melakukan Bimbingan Terhadap tenaga pengelola internet	2023	
Manajemen Birokrasi yang efisien		Investigasi Kebakaran bersama Investigator Kepolisian terkait Penyebab Kejadian Kebakaran	Hasil Pemeriksaan Laboratorium Terkait Investigasi Penyebab Kebakaran	2023	Jangka Pendek	2023	Laboratorium, ATK PC, Print dan Smartphone	Website Damkar dan Aplikasi SI PADAM	2023	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Pemadam Kebakaran terkait Investigator	2023	
		Operasi Gabungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Tim SAR dalam Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	MOU Perangkat Daerah dan Tim SAR	2023	Jangka Pendek	2023	ATK , Print dan Smartphone	Website dan Media Sosial Pemadam Kebakaran	2023	Pelatihan Bersama/Apel Gelar Pasukan menghadapi Bencana	2023	
		Pengembangan kompetensi SDM Pengelola Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Operasional Prosedur mekanisme penjualan dan penghapusan aset tetap	2023	Jangka Pendek	2023	Gedung penyimpanan aset yang Rusak	Aplikasi SIMDA berbasis WEB yang terkoneksi dengan PD Lain	2023	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2023	
		Kemudahan ASN memeriksa data kepegawaiannya melalui aplikasi	Regulasi terkait profil data ASN	2023	Jangka Pendek	2023	Pengembangan aplikasi simASN	Aplikasi simASN	2023	Sosialisasi dan updating data ASN	2023	

		Kemudahan memperoleh informasi terkait ASN yang telah mengikuti Diklat atau Bimtek	Jangka Pendek	SK Bupati	2023	-	Pengembangan aplikasi simASN	2024	Sosialisasi dan updating data ASN	2023
--	--	--	---------------	-----------	------	---	------------------------------	------	-----------------------------------	------

Sasaran Strategis	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun					Penguatan Efisiensi	Tahun		
		Status Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun			Perangkat Lunak Pendukung	Tahun
	melalui updating data secara berkala dari tiap OPD									
	Program Penyidik Teladan (Peningkatan Kompetensi SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS))	Jangka Pendek	SK Bupati Tentang Pembentukan Panitia Kompetensi SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2022	Ruang Sekretariat PPNS, Komputer/Laptop dan Printer	2024	Dokumen SK dalam Bentuk (Pdf. Word Excel)	2023	Bimtek SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2023
	Tanda tangan elektronik	Jangka Pendek	Menyiapkan regulasi terkait Penerapan tanda elektronik (Perbup)	2023	Jaringan internet stabil	2023	Aplikasi persuratan	2024	Sosialisasi Penerapan Tanda Tangan Elektronik, implementasi tanda tangan elektronik	2024, 2025, 2026
	Sistem Aduan dari Dapil	Jangka Pendek	Perbup/Perda	2023	Website, Laptop, Komputer	2023	Aplikasi Pengaduan Aspirasi Masyarakat	2023	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023

Efisiensi Kebijakan Publik	Memanfaatkan teknologi yang berkembang untuk membangun pemerintahan yang lebih efisien	Fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan pada pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Jangka Pendek	Membuat SK dan diregulasikan dalam bentuk Perbud, kemudian diperdakan	2023	-	-	Dokumen, Data, dan Sistem InputOutput	2023	Bimbingan Teknis	2024
		Membuat website BKPSDM untuk media komunikasi sebagai bentuk pelayanan (termasuk keterbukaan dalam menjalankan assessment centre)	Jangka Pendek	Menyiapkan regulasi assesment center melalui Perbup	2023	2023	Mengaktifkan kembali website BKPSDM	Website BKPSDM	2023	Bimbingan IT	2023
		Fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan pada pembahasan kebijakan anggaran	Jangka Pendek	Membuat SK dan diregulasikan dalam bentuk Perbud, kemudian diperdakan	2022	-	-	Dokumen, Data, dan Sistem InputOutput	2023	Bimbingan Teknis	2024

Sub Dimensi	Strategi Inovasi	Status Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Rencana Aksi/Tahun				Penguatan Literasi	
				Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung		Tahun
	Aplikasi terintegrasi dengan e-TPP dan e-SKP	Jangka Pendek	Menyiapkan regulasi eTPP dan e-SKP melalui Perbup	2023	Menyiapkan Aplikasi	2023	Replika Aplikasi eTPP dan eSKP	2023	Sosialisasi dan Bimbingan Peningkatan

IV.2. Rencana Aksi Smart Branding

Tabel IV - 4 Rencana Aksi Jangka Panjang Smart Branding

Sub Dimensi	Strategi Inovasi	Status Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Rencana Aksi/Tahun				Penguatan Literasi	
				Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung		Tahun
Inovasi Panjang Dimensi	Big Data Tourism	Jangka Panjang	Perbup, SK Bupati, MOU, dan POKJA	2025	Data Center Room Setiap Kecamatan	2029	Software Aplikasi/jaringan Internet	2025	Publikasi Media Sosial

Tabel IV - 5 Rencana Aksi Jangka Menengah Smart Branding

Rencana Aksi/Tahun											
Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Pengkatan Literasi	Tahun
Pariwisata	Pengembangan pariwisata minat khusus (tinggal lama, virtual tourism) melalui penguatan kapasitas kelembagaan pariwisata pada tingkat masyarakat	Bimbingan pembuatan paket wisata dan wisata tematik	Jangka Menengah	SK BUPATI dan KAJIAN KELITBANGAN	2024	Pembangunan desa tematik	2025	Data dan Aplikasi Berbasis Web	2024	Bimtek, Pendampingan, dan Sosialisasi Program	2024
Membangun Daya Saing Bisnis	Menarik minat bisnis di Maros melalui penyediaan peta potensi investasi dan	Melaksanakan penyusunan IPRO	Jangka Menengah	MOU, Kepala Dinas, Perda	2022	-	-	Dokumen dan kontel digital	2024	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023
Rencana Aksi/Tahun											
Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Pengkatan Literasi	Tahun
Pariwisata	pengembangan iklim investasi yang kondusif	Pembuatan Aplikasi Informasi Investasi di Kabupaten Maros	Jangka Menengah	Menyiapkan Regulasi terkait Aplikasi informasi	2023	Sarana dan Prasarana pembuatan Aplikasi	2023	Server dan Web	2023	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023

Penataan Wajah Kota	Membangun iklim ruang kondusif melalui pembangunan yang taat pada aturan tata ruang	Digitalisasi potensi lokal daerah, yaitu bentuk promosi daerah, baik pariwisata, ekonomi kreatif melalui portal pemerintah daerah	Jangka Menengah	Investasi Kabupaten menyusun regulasi terkait hak cipta konten promosi untuk menghindari suplikasi konten oleh pihak bertanggung jawab	2023, 2024, 2025	Peralatan dokumentasi, peralatan studio, editing, tenaga design grafis, editing dan jurnalistik	2023, 2024	2023, 2024	2023, 2024	Pelatihan terkait dokumentasi, jurnalistik desing grafis, editing dan jurnalistik	2023, 2024

Tabel IV - 6 Rencana Aksi Jangka Pendek Smart Branding

Sifat Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun		Perangkat Lunak Pendukung	Tahun Pelaksanaan	2023
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Infrastruktur Pendukung			
Pariwisata	Pengembangan pariwisata minat khusus (tinggal lama, virtual tourism) penguatan kelembagaan pariwisata pada tingkat masyarakat	Pembuatan Ruang Publik Literasi Ekonomi kreatif Sport Tourism	Jangka Pendek	Perbup dan SITEPLAN	Pembangunan Sarana Prasaran Ruang Publik	-	2024	2023
				SK Bupati dan Pembentukan Tim Pelaksana	Sarana Prasarana kebutuhan dan keamanan sport tourism	Konten Digital	2023-2024	2023

Sub-Program	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun			Penguatan Literasi	Tahun
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Infrastruktur Pendukung	Tahun		
				Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Tahun	Tahun	
Membangun Daya Saing Bisnis	Menarik minat bisnis di Maros penyediaan peta potensi investasi dan pengembangan iklim investasi yang kondusif	Melakukan Promosi Peta Potensi ke media Sosial	Jangka Pendek	MOU, SK Kepala Dinas	-	2023	2023	
		Membuat Aplikasi Laporan Online Data Perusahaan	Jangka Pendek	MOU	Jaringan Internet, Laptop/PC	2023	2023	
Penataan Wajah Kota	Membangun iklim tata ruang yang kondusif melalui pembangunan yang taat pada aturan tata ruang	Maros Excotic Place	Quick Win	SK Bupati dan Pembentukan Tim Pelaksana	Jaringan Internet, Laptop/PC	2022	2022	
					Website			

Tabel IV - 8 Rencana Aksi Jangka Menengah Smart Economy

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun			Penguatan Literasi	Tahun			
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung			Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun
Ekosistem Industri	Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas produk ekspor melalui Kerjasama dengan stakeholder yang terakit	Menginisiasi pembentukan koperasi modern /koperasi online (di dalamnya ada Toko Online Koperasi, Layanan Online Koperasi, Layanan Laporan Keuangan Terintegrasi, Layanan Anggota Terintegrasi, Layanan Komunitas Koperasi, Layanan RAT Online)	Jangka Menengah	SK Kepala Dinas, Dokumen Pengesahan Kelembagaan Koperasi, dan PKS	2025	Jaringan Internet, Laptop/PC, Operator Aplikasi, dan Server	2026	Aplikasi dan Web Koperasi Digital	2027	Bimtek, Pendampingan, dan Sosialisasi	2024
				SK Dinas dan MOU	2024	Jaringan Internet dan Laptop	2024	Data dan Aplikasi Berbasis Web	2025	Sosialisasi kepada pelaku usaha	2024

Sub-Program	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun				Peningkatan Lifecycle Tahun			
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun		Perangkat Lunak	Tahun	
		Membuat satu Aplikasi (e-SATU) yang di dalamnya memuat semua layanan yang ada pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros, antara lain: 1. database koperasi, UMKM, pedagang, dan IKM, 2. monitoring dan evaluasi; 3. Informasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting, 4. Peta Layanan Tera-Tera Ulang alat UTTP, 5. Layanan Registrasi Pelayanan Pendaftaran Usaha/Nomor Induk Koperasi/NIB	Jangka Menengah	Menyusun SK Tim IT Aplikasi dengan melibatkan pihak terkait	2023	Jaringan Internet dan Laptop	2023	Pengembangan hardware, software dan kelengkapan pendukung Ruang Data Center (core switch, core router, server virtualisasi, firewall, converter, load balancing, dll)	2023	pelatihan penggunaan aplikasi	2023
		1. Aplikasi e-catalog produk olahan hasil perikanan, 2. Aplikasi penerbitan tanda daftar usaha pengolahan ikan	Jangka Menengah	SK Bupati Penggunaan E-Catalog dan Daftar Usaha	2023	Jaringan Internet, Laptop/PC, Operator Aplikasi	2023	Aplikasi Pengembangan Aplikasi ECatalog, Aplikasi Penerbitan Tanda Daftar Usaha	2023, 2024	Pelatihan, Bimbingan Teknis, Sosialisasi Berkala Digital dan Non-Digital	2023, 2024, 2025

	Membuat master plan potensi industri unggulan masing-masing kecamatan melalui aplikasi web yang dapat diakses oleh Perangkat Daerah, Pelaku IKM dan Masyarakat	Jangka Menengah	Surat Perjanjian/Kontrak antara OPD dengan Pihak Ketiga/Penyedia Barang/Jasa, SK Bupati terkait tentang Penunjukan	2023-2027	Jaringan Internet, Laptop/PC, Operator Aplikasi	2023-2027	Aplikasi Pendukung	2023-2027	Bimtek, Pendampingan, dan Sosialisasi	2025
--	--	-----------------	--	-----------	---	-----------	--------------------	-----------	---------------------------------------	------

Sub Dimensi/ Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun			Infrastruktur Tahun Pendukung	Perangkat Tahun Pendukung	Penguatan Tahun Literasi			
		Status Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun						
				Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK						
	Pembinaan dalam bentuk bantuan modal kemitraan, fasilitas kemudahan perizinan, pelatihan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha dalam bentuk aplikasi SMART UMKM	Jangka Menengah	Peraturan Bupati, MOU	2024-2026	Jaringan Internet, Laptop/PC, Operator Aplikasi, dan Server	2025	Aplikasi SMART UMKM	2025	Bimtek, Pendampingan, dan Sosialisasi	2024
	Pembangunan Sentra Industri Gula Aren dengan sistem koperasi	Jangka Menengah	SK Dinas Dokumen Pengesahan Kelembagaan	2025	Gedung Koperasi dan Fasilitas Kelembagaan	2027	Sistem Informasi dan Pendataan Kelembagaan	2025	Pendampingan Bimtek Pengelolaan Koperasi	2024

Tabel IV - 9 Rencana Aksi Jangka Pendek Smart Economy

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun				Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun				
Ekosistem Industri	Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas produk ekspor melalui Kerjasama dengan stakeholder yang terakrit	Melakukan pameran produk export, produk IKM, produk UMKM melalui media sosial/ media virtual	Jangka Pendek	SK Kepala Daerah, MOU dengan Penyelenggara, menyiapkan regulasi	2023	Jaringan Internet dan Laptop	2023	Akun dengan pengaruh tinggi dan produk yang menarik	2023	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023
		terkelolanya pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha secara online	Jangka Pendek	SK Kepala Dlinas	2023	Jaringan Internet dan Laptop	2023	Data dan Aplikasi Berbasis Web	2024	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023
		Menyediakan sistem/alat pembayaran retribusi secara virtual atau melalui emoney	Jangka Pendek	MOU antara Pemerintah Daerah dengan Bank penerima setoran PAD	2023	Aplikasi, card e-money, mesin pembayaran digital	2023	Sistem Pembayaran dan Pendataan berbasis web	2024	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023
		Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi agar lebih produktif dan kreatif dalam melakukan diversifikasi produk, perluasan pemasaran secara online, dan kemas yang up-to-date, dsb	Jangka Pendek	SK Kepala Dinas dan MOU	2023	-	-	-	-	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023

Sub-Strategi Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun				Penguatan Literasi	Tahun
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun		
		Memberdayakan koperasi dan memberikan perlindungan koperasi khususnya KSP/USP melalui kerja sama dengan lembaga penjamin simpanan bagi anggota koperasi agar dapat terus berkembang dan tidak mengalami stagnasi usaha	Jangka Pendek	MOU dengan LPS	2023	-	-	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023
		Peningkatan layanan tera/tera ulang dengan membuat aplikasi khusus metrologi legal untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan jasa layanan tera/tera ulang, misalnya pada saat mengajukan permohonan tera/tera ulang bisa melalui aplikasi dan tidak harus ke kantor, dan langsung direspon oleh Penera	Jangka Pendek	Peraturan Bupati	2024	2024	Data dan Aplikasi Berbasis Web	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2024
		Aplikasi bina mutu hasil periklanan	Jangka Pendek	SK Kepala Dinas	2023	2024	Aplikasi, data dan konten	Sosialisasi Layanan dan Pelatihan	2024
		(UMKM Naik Kelas) membantu UMKM dalam peningkatan skala usahanya menjadi usaha kecil melalui pelatihan pengembangan produksi dan pengeolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi berbasis IT/Aplikasi/Web	Jangka Pendek	SK Bupati, MOU	2024	2024	Aplikasi, data dan konten	Bimtek, Pendampingan, dan Sosialisasi kepada Pelaku Usaha UMKM	2024

Sub-Dimensi/Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Penguatan Literasi		Rencana Aksi/Tahun		Tahun			
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun		Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	
	Aplikasi informasi jadwal panen dan harga dan aplikasi bina mutu hasil perikanan	Jangka Pendek	Membuat SK dan MOU dengan pihak terkait	2023	laboratorium perikanan dan IT	2023 s/d 2024	2023 s/d 2024	Melakukan Bimtek untuk meningkatkan SDM di bidang IT terutama untuk penggunaan Aplikasi	2023 s/d 2024	
	SETORAN DUKUN (Aplikasi Sistem Terpadu Monitoring Produksi, dan Pemasaran Produk Unggulan)	QuickWin	Peraturan dan SK Bupati	2023	Jaringan Internet, Laptop/PC, Operator Aplikasi, dan Server	2023	2023	Data dan Aplikasi Berbasis Web	2023	Pelatihan dan Sosialisasi kepada instansi di Maros untuk melakukan input data terpusat

Kesejahteraan Masyarakat	<p>1. Peningkatan kapasitas sektor pertanian untuk menghasilkan sumber pangan berkualitas dalam pemenuhan kebutuhan pangan local dan menjadi pemasok pangan bagi kota Makassar</p> <p>2. Menciptakan gerakan mencintai produk local untuk</p>	<p>penyediaan aplikasi sistem pelaporan dsetiap desa terkait Serangan Organisme pengganggu tumbuhan dan produksi Tanaman serta penyediaan bahan kimia untuk penanganannya</p>	Jangka Pendek	SK Kepala Dinas	2024	Jaringan Internet dan Laptop, bahan kimia untuk penanganan serangan OPT	2024	Website Dinas Pertanian	2024	Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian dan Bimtek Pengelolaan Aplikasi	2024
		<p>Penggunaan teknologi pembantuan (pengkerdilan) untuk peningkatan produksi budidaya tambak</p>	Jangka Pendek	SK Kepala Dinas	2023	Jaringan Internet, Laptop/PC	2023	Data dan Konten Digital	2023	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun					Penguatan Literasi	Tahun			
			Status Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun			Perangkat Lunak Pendukung		
peningkatan konsumsi produk lokal		Penyediaan Data Hasil Pekarangan Pangan Lestari Melalui Aplikasi	Jangka Pendek	SK Kepala Dinas	2023	Jaringan Internet, Laptop/PC, dan Server	2023	Data dan Aplikasi Berbasis Web	2024	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023	
		Pembentukan Tim Tanggap Penyakit Hewan Menular	Jangka Pendek	SK Kepala Dinas, Pembentukan Pokja	2023	Kantor Sekretariat	2025	-	-	-	Bimtek dan pendampingan kepada anggota tim	2024
		Mendorong perbup terkait pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jangka Pendek	Peraturan Bupati	2024	Kantor Sekretariat	2025	-	-	-	Bimtek, Pendampingan, dan Sosialisasi kepada Petani	2024
Pemanfaatan teknologi informasi untuk menciptakan transaksi non tunai	Ekosistem Transaksi Keuangan	Penyediaan Nelayan Pintar	Jangka Pendek	Kerjasama dengan pihak terkait	2023	Jaringan internet dan laptop	2023	website potensi perikanan	2023	bimtek terkait penggunaan aplikasi	2023	
		Penyediaan aplikasi data statistik produksi nelayan	Jangka Pendek	Kerjasama dengan pihak terkait	2023	Jaringan internet dan laptop	2023	website potensi perikanan	2023	bimtek penggunaan aplikasi	2023	
		Menyediakan sistem/alat pembayaran retribusi tempat pelepasan ikan parkir secara virtual atau melalui e-money	Jangka Pendek	MoU dengan pihak terkait	2023	Kartu money	2023	aplikasi cek saldo money	2023	aplikasi cek saldo money	2023	sosialisasi pembayaran retribusi parkir melalui e money

Sib Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Pengembangan Kelembagaan & Kebijakan	Rencana Aksi/Tahun					
					Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Peringkat Lokal Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi
		Bantuan Modal untuk UKM Produktif	Jangka Pendek	SK Bupati terkait Calon Penerima Bantuan Modal Kerja dan Persyaratan Calon Penerima	2024	-	-	2023	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023

IV.4. Rencana Aksi Smart Living

Tabel IV - 10 Rencana Aksi Jangka Panjang Smart Living

Sub-Dimensi	Rencana Aksi/Tahun					Penguatan Literasi Tahun	
	Status Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun		Peningkat Lunak Pendukung Tahun
Inovasi Jangka Panjang Dimensi	Maros Telemedicine (Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan serta Meningkatkan Layanan Kesehatan Masyarakat miskin difasilitas Kesehatan)	Perlu adanya Perbup dan Perjanjian Kerjasama dengan Provider / Pihak ketiga	2022	Jaringan Instalasi, Data Center, SDM bidang IT Kesehatan	2022, 2023	Melakukan Sosialisasi berupa Media Sosial, Media elektronik dsb, serta peningkatan kapasitas SDM dalam bentuk Diklat	2023
					Aplikasi masih pengembangan yakni HISP, SmartPSC agar bisa menjadi aplikasi telemedicine mutakhir. HISP (Health Information System Programme) adalah Aplikasi yang dibuat dalam merekam data Cakupan Layanan yang terkait 12 Indikator SPM Bidang Kesehatan, Kedepan akan di Kembangkan sebagai Aplikasi Satu Data Terintegrasi		
					Telekonsultasi, Aplikasi Telemedicine		
					SIKERen (Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi)		
					Smart PSC adalah sistem pelayanan gawat darurat dan		

Tabel IV - 11 Rencana Aksi Jangka Menengah Smart Living

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun		Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Infrastruktur Pendukung				
Transportasi	Revitalisasi sarana prasarana transportasi publik	Aplikasi penyedia informasi terkait moda transportasi berupa halte, terminal serta rest area	Jangka Menengah	2023	Pengembangan Perangkat dan Sistem Pemantauan CCTV berupa ATCS; Pengembangan CCTV Analytic (Pemantauan Jumlah, Kecepatan, Kepadatan kendaraan di suatu ruas); Adanya Papan Informasi Tentang Informasi Penataan Ruang; Pengembangan Aplikasi Data Infrastruktur Jalan Berbasis GIS	2021	2021	Melakukan Sosialisasi Tentang Aplikasi	2023

Tabel IV - 12 Rencana Aksi Jangka Pendek Smart Living

Sub-Sasaran	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Rencana Aksi/Tahun			Penguatan Literasi	Tahun		
					Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun			Perangkat Lunak Pendukung	Tahun
Harmonisasi Tata Ruang	Penguatan kapasitas pemerintah desa untuk pengembangan data dan mempercepat penanganan kawasan tidak layak huni	Aplikasi penyedia informasi terkait teknis persyaratan dalam mendirikan bangunan melalui aplikasi SIMBG dan SIPETARUNG	Jangka Pendek	Peraturan Bupati No 43 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Baru Mamminasata Kecamatan Moncongloe 20212041	2021	Adanya Papan Informasi Tentang Informasi Penataan Ruang	2021	APLIKASI SIMBG dan APLIKASI GIS PETARUNG	2021	Melakukan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan di Bidang Penataan Ruang	2022
					2023						
Kesehatan	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan modern dengan basis teknologi untuk pelayanan penduduk Maros dan meraih konsumen diluar Maros	Aplikasi SIMRS, Sisirut, Vclaim, Sirsoline Kemenkes (Ketersediaan Informasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan yang telah berizin)	Jangka Pendek	Perlu Adanya perjanjian kerja sama dengan Provider/Pihak Ketiga	2023	SDM Bidang IT Kesehatan	2023	SIMRS Khanza Bridging dengan BPJS	2024	Melakukan Sosialisasi Pendaftaran Online ke Masyarakat	2022
					2023	Alat-alat kesehatan dengan kualitas lebih baik	2024	-	-	-	

IV.5. Rencana Aksi Smart Society

Tabel IV - 13 Rencana Aksi Jangka Panjang Smart Society

Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun			Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Peningkatan Bioteknologi	Tahun	
				Pengembangan Kebijakan & Kelengkapan	Tahun	Infrastruktur Pendukung					Tahun
Inovasi Dimensi	Jangka Panjang	Peningkatan Layanan Pendidikan Hidup (PKH)	Jangka Panjang	Peraturan Daerah dan Lembaga Pembinaan & Pelatihan	2025	Kantor Sekretariat Gedung Pelatihan	2028	Data dan Website terpadu	2027	2026	Bimtek, Pendampingan, dan Sosialisasi Pelayanan
	Jangka Panjang	Penguatan kapasitas masyarakat desa dalam mencegah terjadinya bencana dan menghadapi kejadian bencana (Desa tanggap bencana)	Jangka Panjang	SK Bupati	2025	Ruang Kontrol, Perangkat Keras Robotik, dan SDM Operator Robotik	2028	Data, Sensor, Sistem Robotik	2028	2027	Pelatihan, Transfer Teknologi, dan Uji Coba
Menjamin Keselamatan Masyarakat	Jangka Panjang	Peningkatan Layanan Pendidikan Hidup (PKH)	Jangka Panjang	Peraturan Daerah dan Lembaga Pembinaan & Pelatihan	2025	Ruang Kontrol, Perangkat Keras Robotik, dan SDM Operator Robotik	2028	Data dan Website terpadu	2027	2026	Bimtek, Pendampingan, dan Sosialisasi Pelayanan
	Jangka Panjang	Penguatan kapasitas masyarakat desa dalam mencegah terjadinya bencana dan menghadapi kejadian bencana (Desa tanggap bencana)	Jangka Panjang	SK Bupati	2025	Ruang Kontrol, Perangkat Keras Robotik, dan SDM Operator Robotik	2028	Data, Sensor, Sistem Robotik	2028	2027	Pelatihan, Transfer Teknologi, dan Uji Coba

Tabel IV - 14 Rencana Aksi Jangka Menengah Smart Society

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Interaksi Masyarakat	Revitalisasi kearifan local masyarakat untuk pengembangan interaksi sosial yang sehat dalam masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis kelembagaan tingkat desa	Transformasi Edukasi dan layanan bagi anak dan remaja yang berbasis Inklusi	Jangka Menengah	Menyusun Proposal/KAK	2023	1. Infrastruktur Jaringan Internet. 2. Sarana Prasaran	2023	Website Dinas	2023	Edukasi dan Informasi terkait Kesehatan Reproduksi bagi Remaja, Pencegahan Perkawinan Usia anak, dan Kampanye yang diadakan di sekolah	2023
		Pengelolaan dan Pengembangan data dengan sistem Citra Satelit	Jangka Menengah	1. SK Kadis Tentang Pembentukan TIM Pelaksanaa Pelayanan 2. Menyusun MOU dengan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)	2022	1. Infrastruktur Jaringan Internet. 2. Sarana Prasaran (Laptop , Gedung)	2023	Website Dinas Sosial	2022 - 2023	Bimtek Pengelolaan data pada Citra Satelit	2023

Membangun Ekosistem Edukasi	Penguatan kapasitas berbagai Lembaga yang terkait dengan Pendidikan untuk gerakan digitalisasi sekolah	Program Sekolah Penggerak/Smart School (jangka panjang)	Jangka Menengah	1. MoU antara Kemedikbud Ristek dengan Pemerintah Kabupaten Maros tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, 2. Surat Edaran Terkait Penyelenggaraan	2022	1. Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan yang sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional, 2. Penyediaan Peralatan/Media Pendidikan berbasis TIK,	2023	1. Website Satuan Pendidikan, Website Dinas	2022-2023	1. Sosialisasi Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, 2. Booklet Sekolah Penggerak, 3. Penyediaan Buku/Bahan	2023
-----------------------------	--	--	-----------------	--	------	--	------	---	-----------	--	------

Strategi Inovasi		Status Inovasi		Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan		Rencana Aksi/Tahun		Perangkat Lunak Pendukung		Penguatan Literasi	
Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
			Program Sekolah Penggerak, 3. Peraturan Bupati Mengenal Penyelenggaraan Sekolah Penggerak		3. Penguatan Kompetensi Pendidik yang berbasis TIK, 4. Penguatan Akses Jaringan Internat pada Satuan Pendidikan, 5. Penguatan Jaringan Listrik, 6. Penyediaan Sarana Sanitasi Sekolah						Bacaan dan Perpustakaan bagi Satuan Pendidikan

Menjamin Keselamatan Masyarakat	Penguatan kapasitas masyarakat desa dalam mencegah terjadinya bencana dan menghadapi kejadian bencana (Desa tanggap bencana)	Aplikasi Kerja Online Sistem Linked In khusus di Kabupaten Maros melalui kerja sama dengan perusahaan atau lembaga pencari kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan)	Melakukan Operasi Yustisi/Non Yustisi bersama Instansi/Lembaga Terkait (TNI/POLRI, Dishub, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kejaksaan, Pengadilan Negeri) dalam penegakan Perda dan Perkada (SIDANG PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN / TIPIRING)	Jangka Menengah	Peraturan Bupati, PKS dengan perusahaan dan lembaga terkait, payung hukum pelindung pencari kerja	2025	Jaringan Internet, Laptop/PC, Operator Aplikasi, dan Server	2025	Data, Aplikasi, dan Web	2026	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2025
				Jangka Menengah	Perjanjian Kerja Sama dalam penegakan Perda dan Perkada (SIDANG PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN / TIPIRING)	2022	Pejabat Fungsional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Komputer/Laptop dan Printer	2023	Dokumen Elektronik (Pdf. Word Excel)	2023	Rapat Tentang Tugas Masing Masing Tim Operasi Yustisi dan Apel Gelar Pasukan	2023

Sub Dimensi	Strategi Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun				Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung			
	Desa Tangguh Bencana	Jangka Menengah	SK Bupati	Sarana prasarana desa bencana	2024	Konten Digital dan Sistem Informasi Kebencanaan	Bimtek, Pendampingan, dan Sosialisasi Pelayanan	2024	
	Big Data Kebencanaan	Jangka Menengah	PERDA dan SK Bupati tentang teknis pusat data	Lokasi/ Ruang data, Server, perangkat mobile	2023	Teknik manajemen, Sistem keamanan, Jaringan internet	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2025	
	sistem informasi bencana via smartphone berupa peringatan sebelum terjadi bencana	Jangka Menengah	PERDA dan SK Bupati tentang sistem informasi penanggulangan bencana	Perangkat mobile, Server, Jaringan internet	2023	Aplikasi alarm	Sosialisasi kepada masyarakat	2024	

<p>WARGA SIAGA BRASTA DAHANA (peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam mencegah, mendeteksi dini dan melakukan pemadaman awal kebakaran) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Kebakaran (REDKAR) Desa/Kelurahan (Kecamatan Bantimurung Desa Mangaloreng dan Alatengae)</p>	<p>Jangka Menengah</p>	<p>Pembentukan Relawan Kebakaran (REDKAR) Tingkat RT/RW, Desa Kelurahan dan Kecamatan dan Pembentukan Tim HUMAS Damkar yang mengelola adsense Media Sosial Pemadam Kebakaran</p>	<p>2022</p>	<p>Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (APAR, Baju Safety dan Motor Damkar) untuk Redkar, Komputer, Printer dan Smartphone</p>	<p>2023</p>	<p>Website Damkar, Media Sosial dan Aplikasi SI PADAM</p>	<p>2023</p>	<p>Bimtek SDM Relawan Kebakaran</p>	<p>2023</p>
---	----------------------------	--	-------------	--	-------------	---	-------------	---	-------------

Rencana Aksi/Tahun										
Sub Dimensi	Strategi Inovasi	Status Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Pengujian Literasi	Tahun
	Pemasangan sensor-sensor yang mampu mendeteksi potensi bencana: banjir, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung dan longsor	Jangka Menengah	SK TIM dari Bupati	2023	Peralatan sensor dan konektivitas jaringan	2023	Aplikasi pemantau bencana	2023	Mengedukasi masyarakat yang bermukim di lokasi pemasangan sensor	2023

Tabel IV - 15 Rencana Aksi Jangka Pendek Smart Society

Rencana Aksi/Tahun											
Sub Dimensi	Strategi Inovasi	Status Inovasi	Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Pengujian Literasi	Tahun	
Interaksi Masyarakat	Revitalisasi kearifan local masyarakat untuk pengembangan interkasi sosial yang sehat dalam masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis kelembagaan tingkat desa	Jangka Pendek	Pengembangan Fitur Aplikasi Ormas (Organisasi Kemasyarakatan)	2022	1. SK Kaban Tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Pembahas pada Kegiatan Sosialisasi	2022	1. Jaringan Internet 2. Laptop	2023	Konten Digital	2023	Publikasi dan Sosialisasi Program

	Uji Kompetensi Bagi Kader Perempuan Partai Politik	Jangka Pendek	1. SK Kaban Tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Pembahas pada Kegiatan Sosialisasi	2022	1. Jaringan Internet 2. Laptop	2023	Konten Digital	2023	Publikasi dan Sosialisasi Program	2023
--	--	---------------	--	------	--------------------------------	------	----------------	------	-----------------------------------	------

Sub-Program	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	Sistem aduan penanganan PPKS terpadu		Jangka Pendek	1. SK Tentang Pembentukan Sistem aduan dan penanganan terpadu, 2. Pembentukan Aplikasi terkait Layanan Pengaduan Penanganan PPKS	2023	1. Infrastruktur Jaringan Internet. 2. Sarana Prasaran	2023	Sistem Pelayanan Berbasis Web dan Laporan Digital Lainnya	2023	Sosialisasi terkait Layanan aduan dan Pelayanan PPKS	2023
	Membuat Sistem Pendaftaran dan Pengaduan terkait Aduan dan pendaftaran Ormas		Jangka Pendek	SK Kepala Dinas terkait Layanan terintegrasi	2023	1. Infrastruktur Jaringan Internet. 2. Sarana Prasaran	2023	Sistem Pelayanan Berbasis Web dan Laporan Digital Lainnya	2023	Sosialisasi terkait Layanan aduan dan Pelayanan Ormas	2023

Membangun Ekosistem Edukasi	Penguatan kapasitas berbagai Lembaga yang terkait dengan Pendidikan untuk gerakan digitalisasi sekolah	Transformasi Layanan pengaduan korban kekerasan berbasis Inklusi	Quick Win	Menyusun MOU dengan Jejaring Layanan	2022	1. Infrastruktur Jaringan Internet. 2. Sarana Prasaran	2023	Pembuatan aplikasi/ Jaringan Layanan Pengaduan terintegrasi, Website Dinas, Website UPTD P2TP2A	2023	Sosialisasi terkait Layanan terintegrasi pengaduan kasus korban kekerasan bagi perempuan	2023
		Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan Nonformal/Lembaga Kursus (English Camp)	Jangka Pendek	1. Mou Antara Pemerintah Kabupaten dengan Lembaga Kursus	2023	1. Penyediaan Sarana Prasarana pendukung,	2023	Konten Digital	2023	1. Sosialisasi Kegiatan English Camp,	2023

Struktur Organisasi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Renana Aksi/Tahun	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Pengukuran Kinerja	Tahun
		Layanan Perpustakaan Elektronik merupakan inovasi layanan buku elektronik di perpustakaan daerah	Quick Win	1. SK Kadis tentang Pengelolaan Layanan Perpustakaan Elektronik; 2. SOP Layanan Perpustakaan Elektronik	2022	1. SDM berlatar pendidikan teknologi informasi; 2. Koleksi buku digital; 3. Komputer/laptop	2022/2023, dst	Jaringan internet (server web) dan intranet (server lokal)	2022/2023, dst	1. Sosialisasi layanan perpustakaan elektronik; 2. Mendampingi pemustaka dalam mengaplikasikan perpustakaan elektronik	2022/2023, dst
		Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan inovasi layanan untuk masyarakat berkegiatan di perpustakaan daerah	Quick Win	2. SK Kadis tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; 2. SOP Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	2022	1. Ruang pertemuan, ruang komputer, ruang belajar, ruang berlatih keterampilan kerja	2022/2023/2024, dst	Jaringan internet	2022/2023, dst	1. Sosialisasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial; 2. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (lembaga swasta/ormas/lembaga pemerintah) untuk bantuan penganggaran (membiayai kegiatan masyarakat di perpustakaan daerah)	2022/2023/2024, dst

Menjamin Keselamatan Masyarakat	Penguatan kapasitas masyarakat desa dalam mencegah terjadinya bencana dan menghadapi kejadian bencana (Desa tanggap bencana)	Penyampaian materi sosialisasi informasi rawan bencana melalui beberapa saluran channel youtube, kunjungan ke sekolahsekolah dan POSYANDU	Jangka Pendek	SK TIM dari Kepala OPD	2023	Alat untuk sosialisasi	2023	Konten video untuk diunggah ke channel youtube	2023	-
---------------------------------	--	---	---------------	------------------------	------	------------------------	------	--	------	---

Strategi Inovasi	Status Inovasi	Peningkatan Kebijakan & Kelembagaan	Rencana Aksi/Tahun		Peningkatan Literasi	Tahun
			Infrastruktur Pendukung	Perangkat Lunak Pendukung		
Sistem peringatan dini cuaca buruk di laut secara mobile (Menggunakan Speed Boat yang sudah dimiliki)	Jangka Pendek	Sertifikasi kompetensi untuk mengoperasikan sistem peringatan dini dan peralatannya (termasuk Speed Boat)	2023	Peralatan pendukung untuk pemantauan cuaca buruk	-	2024
Pengelolaan Adense Media Sosial Pemadam Kebakaran melalui HUMAS DAMKAR	Jangka Pendek	SK Kepala Dinas	2023	-	Akun dan Konten Digital Sosial Media	2023

Dokumen Data Standar Kelayakan Alat Proteksi Kebakaran (Pasif/Aktif) Bangunan/Gedung/lingkungan Terintegrasi Melalui Website/Aplikasi Smartphone	Jangka Pendek	Aplikasi E-Proteksi Kebakaran (Playstore/Appstor e)	2023	ATK dan Sticker Pemeriksaan PC, Print dan Smartphone	2023	Website Damkar dan Aplikasi SI PADAM	2023	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Pemadam Kebakaran (Inspektur dan Penyuluh)	2023
Pembuatan E-Book Wawasan Kebangsaan yang bisa diakses oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun melalui website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jangka Pendek	1. SK Kaban Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bimtek	2022	1. Jaringan Internet 2. Laptop	2023	Konten Digital	2023	Pelatihan Tim Pelaksana	2023
Pembentukan Kader Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial	Jangka Pendek	1. SK Kaban Tentang Pelaksanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring,	2022	1. Jaringan Internet 2. Laptop	2022	-	-	Publikasi dan Sosialisasi Program	2023

Sub-Bidang	Strategi Inovasi	Inovasi	Status Inovasi	Pembangunan Kebijakan & Kelembagaan	Rencana Aksi/Tahun				Penguatan Literasi	Tahun
					Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung		
		Call Center Kebencanaan	Jangka Pendek	Evaluasi dan Pelaporan Penanganan Konflik Sosial SK Bupati	2023	Server, Jaringan internet, Ruangan Call Center	2023	Jaringan Call Center	2023	2023
		Ransel darurat di rumah/gedung pemerintahan	Jangka Pendek	PERDA	2025	-	2025	-	Sosialisasi dan Pelatihan Program	2023
		Pengadaan penampungan/ tangki air bersih untuk mengatasi kekeringan dengan skema kerjasama (MoU) bersama stake holder di Kab. Maros.	Jangka Pendek	PERBUP terkait dengan kerjasama dengan pihak swasta	2025	-	-	-	Memberikan pemahaman kepada perusahaan yang akan diajak kerjasama	2023
		PUSDALO (Pusat Pengendalian Data dan	Quick Win	Perbup	2023	Jaringan Internet, Laptop/PC, dan Server	2023	Data dan Aplikasi Berbasis Web	Sosialisasi dan Pelatihan Program	2023

IV.6. Rencana Aksi Smart Environment

Tabel IV - 16 Rencana Aksi Jangka Panjang Smart Environment

Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Pembangunan Kebijakan & Kelembagaan		Rencana Aksi/Tahun			Tahun		
				Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Pendukung	Lunak		Tahun	Penguatan Literasi
Inovasi Jangka Panjang Dimensi Environment		Ubah Sampah Menjadi Emas	Jangka Panjang	SK Bupati	2026	Lokasi dan alat pengolahan sampah	2028	Materi Pembelajaran dan Platform Penjualan Barang Olahan	2029	Melakukan Sosialisasi, Bimbingan dan Pelatihan Pengolahan Sampah Daur Ulang	Teknis Tentang 2027

Tabel IV - 17 Rencana Aksi Jangka Menengah Smart Environment

Sub Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun		Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Infrastruktur Pendukung						
Proteksi Lingkungan	Pengarusutamaan perlindungan berbasis masyarakat melalui kolaborasi berbagai stakeholder	Database terkait dokumen lingkungan hidup dapat dikelola berbasis online.	Jangka Menengah	PERGUB, PERDA,	2023	Jaringan dan Laptop	2024	Dokumen Daring	2024	Sosialisasi Layanan dan Penguatan Dokumen Lingkungan Hidup	2023

Pengelolaan Sampah dan Limbah	Memperkuat gerakan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat melalui Kerjasama dengan berbagai stakeholder	Aplikasi pelaporan terkait kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta aduan pengelolaan sampah dan memantau secara online kualitas lingkungan serta kondisi persampahan Kabupaten Maros	Jangka Menengah	Perbup	2025	Jaringan Internet, Laptop/PC, Operator Aplikasi, dan Server	2026	Data, Aplikasi, Website	2027	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2025
Rencana Aksi/Tabun											
Strategi											
Inovasi											
Status Inovasi											
Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan											
Infrastruktur Pendukung											
Perangkat Lunak Pendukung											
Pengukuran Literasi											
		Pengembangan kampung iklim di setiap Desa/ Kelurahan	Jangka Menengah	SK dari Bupati untuk penunjukan dan penetapan lokasi program kampung iklim daan sekolah adiwiyata	2023	- Kendaraan - Laptop - Konektivitas jaringan internet	2023	Aplikasi	2024	Sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pengelolaan kampung iklim da sekolah adiwiyata	2023
		Pengembangan sekolah Adiwiyata di setiap kecamatan	Jangka Menengah	Perda, Perbup, PKS	2025	Infrastruktur Pendukung, Sarana, Prasarana Listrik Tenaga Surya	2028	Sistem Pengaturan Energi Surya	2027	Sosialisasi, Pelatihan, Pembinaan, dan Pengawasan	2027
Tata Kelola Energi	Menciptakan Gerakan pemanfaatan energi terbarukan berbasis masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder	Listrik Tenaga Surya	Jangka Menengah								

Tabel IV - 18 Rencana Aksi Jangka Pendek Smart Environment

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Status Inovasi	Rencana Aksi/Tahun				Penguatan Literasi	Tahun	
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung			
Proteksi Lingkungan	Penguatan perlindungan lingkungan berbasis masyarakat melalui kolaborasi berbagai stakeholder	sistem layanan pengolahan limbah secara online	Jangka Pendek	Perbup	2023	Jaringan dan Laptop	Sistem Aduan Berbasis web	2023	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023
Pengelolaan Sampah dan Limbah	Memperkuat gerakan pengelolaan sampah terpadu masyarakat melalui Kerjasama dengan berbagai stakeholder	Tim pengolahan sampah bekerja dan beroperasi secara online/ dan membuat aplikasi terkait data pengolahan sampah Pengawasan melalui sistem pelaporan peaksanaan UKL-UPL melalui sistem informasi lingkungan BERLIN (Bersih Lingkungan)	Jangka Pendek	SK Bupati untuk pembentukan Tim Pengawasan	2023	- Kendaraan operasional	-	2024	Pelatihan dan Pendampingan Tim	2023
Pengelolaan Sampah dan Limbah	Memperkuat gerakan pengelolaan sampah terpadu masyarakat melalui Kerjasama dengan berbagai stakeholder	Tim pengolahan sampah bekerja dan beroperasi secara online/ dan membuat aplikasi terkait data pengolahan sampah Pengawasan melalui sistem pelaporan peaksanaan UKL-UPL melalui sistem informasi lingkungan BERLIN (Bersih Lingkungan)	Quick Win	SK dari Bupati untuk pengelola bank sampah	2023	Sistem Berbasis Web	Aplikasi	2023	Sosialisasi tentang sistem pelaporan	2023
Pengelolaan Sampah dan Limbah	Memperkuat gerakan pengelolaan sampah terpadu masyarakat melalui Kerjasama dengan berbagai stakeholder	Tim pengolahan sampah bekerja dan beroperasi secara online/ dan membuat aplikasi terkait data pengolahan sampah Pengawasan melalui sistem pelaporan peaksanaan UKL-UPL melalui sistem informasi lingkungan BERLIN (Bersih Lingkungan)	Quick Win	SK dari Bupati untuk pengelola bank sampah	2023	- Bangunan untuk kantor bank sampah - Konektivitas Jaringan inernet	Aplikasi	2023	Sosialisasi dan pelatihan pengelolaan bank sampah	2023

Tata Kelola Energi	Menciptakan Gerakan pemanfaatan energi terbarukan berbasis masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder	Kampung Hijau Energi	Jangka Pendek	SK Bupati	2023	Sensor Cahaya Lampu Otomatis dan Perlengkapan Ramah Lingkungan	2024	Sistem Operasi Terpadu Ramah energi	2024	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2023
		Sistem layanan pengaduan terkait lingk	Jangka Pendek	SK Dinas	2023	Jaringan, Server, dan Komputer	2023	Data dan Aplikasi	2024	Publikasi dan Sosialisasi Layanan	2024

BAB V. PETA JALAN SMART CITY KABUPATEN MAROS

Road map atau peta jalan pembangunan Smart City Kabupaten Maros dimulai dari program quick win (1 tahun) yang menjadi batu pijakan dalam pembangunan Smart City, kemudian dilanjutkan oleh inovasi lainnya sehingga membentuk kesatuan inovasi jangka panjang. Pembangunan Smart City Kabupaten Maros dilanjutkan berdasarkan roadmap jangka pendek (1-2 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka panjang (10 tahun). Asumsi pembangunan smart city di Kabupaten Maros bersifat multi-step settlement untuk mendukung program panjang dengan skala besar di belakangnya.

Berdasarkan susunan visi, misi, program, dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Maros 2021-2026, maka road map pembangunan smart city yang dijabarkan dalam master plan ini sesuai dengan arah pembangunan daerah. Dengan demikian, smart city mampu menjadi akselerator dalam percepatan pembangunan daerah di era modern.

Tabel V - 2 Peta Jalan Jangka Menengah Smart Governance Tahun 2023-2027

Sub-Program	Strategi	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI/37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana
							2023		2024		2025		2026		2027		
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
Layanan Publik	Mendekatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Program Pengelolaan dan Pengendalian PBB/BPHTB / Penerbitan SPPT PBB dan BPHTB	Persentase masyarakat yang mengurus SPPT administrasi perpajakan	6.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	Aplikasi BPHTB diakses hanya di laptop melainkan juga dapat diakses pada smartphone android dan IOS sehingga masyarakat dapat mengupload data data yang dibutuhkan dan dapat mengetahui perjalanan berkas hingga terbit SPPT (BPHTB)	Jangka Menengah	95%	Rp691.622.500	100%	Rp691.622.500	100%	Rp732.203.625	100%	Rp732.203.625	-	APBD	Bapenda
							95%	Rp691.622.500	100%	691.622.500	100%	Rp732.203.625	100%	Rp732.203.625	-	APBD	BAPENDA
Layanan Publik	Mendekatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	Kegiatan Pengelolaan pendapatan daerah	PAD	6.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	SISMIOP	Jangka Menengah	95%	Rp691.622.500	100%	691.622.500	100%	Rp732.203.625	100%	Rp732.203.625	-	APBD	BAPENDA
				6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang diminta secara daring			95%	Rp691.622.500	100%	691.622.500	100%	Rp732.203.625	100%	Rp732.203.625	-	APBD	BAPENDA

Sub-Dimensi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SMI 37.122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector		
						2023		2024		2025		2026				2027	
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran			Target Kinerja	Anggaran
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA / Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Kerjasama antar Desa	9.1 Persentase bangunan publik yang dapat diakses oleh orang-orang dengan kebutuhan khusus	TAKERDES (Tanggap Kerja Sama Antar Desa)	Jangka Menengah	80 Desa	Rp157.000.000	80 Desa	Rp157.000.000	80 Desa	Rp157.000.000	80 Desa	Rp157.000.000	80 Desa	DAU	Dinas PMD		
						0.000	100%	0.000	100%	0.000	100%	0.000	100%				
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Untuk Pemanfaatan Data	Persentase Ketersediaan DataBase Kependudukan Untuk Pemanfaatan Data	6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses yang diminta secara daring	INDEKS (Informasi Data Kependudukan Maros) Layanan Akses Elemen Data Agregat kependudukan dan Profil Kependudukan berbasis Web online	Jangka Menengah	100%	Rp25.000.000	100%	Rp25.000.000	100%	Rp30.000.000	100%	Rp30.000.000	100%	DAU	DISDUKCAPIL		
						0.000	100%	0.000	100%	0.000	100%	0.000	100%				
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	Jumlah Desa yang menyajikan data wilayah desa/desa yang menyediakan data standar	6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses yang diminta secara daring	Membentuk Desa Cinta Statistik (Desa Cantik), Pencatatan atau data RW/Dusun setiap sektor ada di desa dan dilakukan oleh aparat desa itu sendiri.	Jangka Menengah	2 Desa	Rp100.000.000	2 Desa	Rp100.000.000	2 Desa	Rp100.000.000	2 Desa	Rp100.000.000	2 Desa	APBD/ADD Desa	Dinas Kominfo - SP		
						0.000	100%	0.000	100%	0.000	100%	0.000	100%				
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase penyebaran informasi melalui pengelolaan	6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses yang dapat	Web Desa Mandiri (Memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kegiatan)	Jangka Menengah	50%	Rp25.000.000	60%	Rp25.000.000	70%	Rp25.000.000	80%	Rp25.000.000	90%	APBD/ADD Desa	Dinas Kominfo - SP dan DPMD		
						0.000	60%	0.000	70%	0.000	80%	0.000	90%				

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD Mendapatkan HAK AKSES dalam pemanfaatan Data NIK	1.1 Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka	BERHIAS (Berkas Lengkap Sehari Tuntas) aplikasi khusus pemanfaatan Data NIK melalui MOU pemanfaatan data yg diperuntukkan khusus lembaga dan instansi Non Vertikal.	Jangka Menengah	8 OPD	Rp60.000. 000	100 %	10 OPD	Rp150.000. .000	12 OPD	Rp160.000. .000	15 OPD	Rp180.000. 0.000	20 OPD	Rp200.000. .000	DAK/DA U	DISDUK APIL
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Replikasi Aplikasi dalam bentuk Pelayanan Administrasi Kepegawaian Online (Layanan-layanan Kepegawaian) dan Sistem Kinerja Pegawai (SKP) sehingga ASN mudah mengakses segala jenis data- data ASN dari semua OPD, seperti cuti, KGB, kenaikan Pangkat, data Diklat atau Bimtek melalui updating data	Jangka Menengah	8 OPD	Rp95.309. 500	100 %	10 OPD	Rp112.195. .000	12 OPD	Rp117.195. .000	15 OPD	Rp122.19 5.000	20 OPD	Rp135.000. .000	DAU	BKPSDM

Sub-Dimensi	Strategi	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)								Sumber Dana	Leading Sector		
							2023		2024		2025		2026				2027	
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran			Target Kinerja	Anggaran
					secara berkala dari tiap OPD													
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Terlaksananya Pengawasan Pemerintah Kinerja Daerah	6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pengembangan Aplikasi sistem informasi pengawasan (SIMWAS)	Jangka Menengah	118 Laporan	Rp.1.383.850.000	118 Laporan	Rp.1.383.850.000	118 Laporan	Rp.1.383.850.000	118 Laporan	Rp.1.383.850.000	118 Laporan	Rp.1.383.850.000	APBD	Inspektorat
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang telah terverifikasi Indikator ini langsung tertuju kepada penilaian WTP	6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Penyusunan Database Barang Milik Daerah yang terintegrasi dengan SKPD Lain	Jangka Menengah	100 %	Rp62.699.700	100 %	Rp65.834.685	100 %	Rp69.126.419	100 %	Rp72.582.740	100 %	Rp76.211.877	APBD	BKAD
Efisiensi Kebijakan Publik	Memfaatkan teknologi yang berkembang untuk membangun pemerintahan yang lebih efisien	Program Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan	6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pembangunan Aplikasi econsulting	Jangka Menengah	3 Perbup	Rp.50.506.000	3 Perbup	Rp.50.506.000	3 Perbup	Rp.50.506.000	3 Perbup	Rp.50.506.000	3 Perbup	Rp.50.506.000	APBD	Inspektorat

Tabel V - 3 Peta Jalan Jangka Pendek Smart Governance Tahun 2023-2024

Sub Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SMI 3/1/22	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)		Sumber Dana	Landing Sector		
							2023				2024	
							Target Kinerja	Anggaran			Target Kinerja	Anggaran
Layanan Publik	Mendekatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH / Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah	6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Aplikasi SIMDA berbasis WEB agar terkoneksi dengan SKPD lain	Jangka Pendek	3 Laporan	Rp75.810.000	DAU	BKAD		
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	6.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	Melakukan upgrade pada Aplikasi SIMPEL khususnya pada pengambilan Nomor antrian secara online	Jangka Pendek	26 Izin	Rp385.000.000	DAK	DPMPTSP		
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dikelola dalam sistem informasi penanaman modal	6.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	Melakukan sosialisasi penggunaan OSS ke tingkat kecamatan dan kelurahan sehingga memudahkan masyarakat terpencil dan melakukan registrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan	Jangka Pendek	1 Jenis	Rp75.000.000	DAU	DPMPTSP		

Sub Dimensi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)			Sumber Dana	Landing Page	
						2025		Anggaran			
						Target Kinerja	Anggaran				
	Program Pelayanan Penanaman Modal Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Dokumen Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Indikator kegiatan : Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Nama : SIPUTRI (Sistem Jemput Dokumen Perizinan) Sasaran Ke Masyarakat di desa terpencil pelayanan penjemputan dokumen perizinan ke desa terpencil yang dilakukan secara terjadwal	Quick Win	26 Izin	350,000,000	26 Izin	Rp385.000.000	APBN	DPMPPTSP
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil dengan Sistem Layanan Stelsel Aktif	6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	OM DUK (Ojek Melayani Dokumen Kependudukan) Layanan berbasis Covid19, Antar Jemput Berkas permohonan dan dokumen adminduk. (Berbasis On Line)	Quick Win	97%	Rp40.000.000	97%	Rp50.000.000	DAU	DISDUKCAPI L
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Dengan Sistem Layanan Stelsel Aktif	6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	TANDU (Tanggap Layanan terhadap responsif permintaan perekaman KTP-el bagi penduduk sulit akses, disabilitas dan yang terkena dampak alam/sosial.	Quick Win	98%	Rp40.000.000	98%	Rp50.000.000	DAU	DISDUKCAPI L

Sub-Tema	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SMI 37122	Inovasi	Status Inisiasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam Rupiah)		Sumber Dana	Landing Spot
						2023	2024		
						Target Kinerja	Anggaran		
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	API (Aplikasi Pencari Issue)	Quick Win	100%	Rp100.000.000	DAU	Bappelitbangda
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah di seluruh desa	6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	E-Spot Titik Hotspot gratis di Desa)	Quick Win	100%	Rp4.000.000.000	investor	Dinas Kominfo-SP dan DPMD
Manajemen Birokrasi Yang Efisien	Layanan Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen Yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran	6.3 Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan nondarurat kota (hari)	Investigasi Kebakaran bersama Investigator Kepolisian terkait Penyebab Kejadian Kebakaran	Jangka Pendek	1 Dokumen	Rp105.000.000	APBD/DAU	Satpol-PP dan Damkar

Sub Direksi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam jutaan rupiah)		Sumber Dana	Leadin Sesuai
							2023			
							Target Kinerja	Anggaran		
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (Pelaksanaan Reses).	Jumlah Aspirasi yang dihasilkan atau aspirasi yang selaras dengan perencanaan (RKPD)	6.3 Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan nondarurat kota (hari)	Sistem Aduan Dapil	Jangka Pendek	5.575 Aspirasi	Rp21.800.000.000	DAU	SEKRET ARIA T DPRD
		Pelayanan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Jenis Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	6.3 Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan nondarurat kota (hari)	Operasi Gabungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Tim SAR dalam Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jangka Pendek	4 Jenis	Rp1.126.385.000	APBD/DAU	Satpol-PP dan Damkar
		Pengelolaan Barang Milik Daerah / Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik	6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pengembangan kompetensi SDM Pengelola Barang Milik Daerah	Jangka Pendek	15 dokumen	Rp62.699.700	APBD	BKAD

Sasaran	Target Kinerja/ Anggaran (dalam juta rupiah)		Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Instansi
	Target Kinerja	Anggaran						
ASN data lainnya aplikasi SIM-	Jangka Pendek	Jumlah pegawai yang sudah terdata di aplikasi	1 Dokumen	Rp53.695.000	100%	Rp58.695.000	APBD	BKPSDM
ASN memperoleh terkait ASN yang mengikuti Diklat ntek melalui data secara tiap	Jangka Pendek	95%	100%	Rp3.506.283.273		Rp3.867.974.154	APBD	BKPSDM
nyidik Teladan an Kompetensi dik Pegawai (PPNS))	Jangka Pendek	1 Laporan	1 Laporan	Rp187.500.000		Rp201.000.000	APBD/DA U	Satpol-PP dan Damkar
Tanda untuk seluruh an gunaan Tanda aktronik untuk i kan yang dapat ppa	Jangka Pendek	3 OPD	5 OPD	Rp50.000.000		Rp100.000.000	APBD	Dinas Kominfo-SP

Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja	Target Kinerja Anggaran	Target Kinerja (dalam Rupiah)	Target Kinerja (dalam Rupiah)	Sumber Dana	Lokasi
ke desa melalui internet gratis							
<ul style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Kegiatan 2. Penyusunan peraturan daerah dan peraturan DPRD 	Jangka Pendek	12 Layanan	Rp505.000.000	12 Layanan	Rp545.000.000	APBD	SEKRETARIA T DPRD
<ul style="list-style-type: none"> 1. Membuat website BKPSDM untuk media komunikasi sebagai bentuk pelayanan (termasuk keterbukaan dalam menjalankan assessment centre) 	Jangka Pendek	1700 ASN	Rp920.000.000	1500 ASN	Rp1.058.000.000	APBD	BKPSDM
<ul style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan pada pembahasan kebijakan anggaran 	Jangka Pendek	10 Layanan	225,000,000	10 Layanan	250,000,000	APBD	SEKRETARIA T DPRD

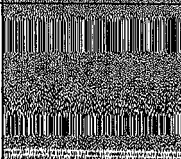
Dokumen Evaluasi Penilaian Evaluasi Aparatur	6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Indikator SMI 37/122 /inovasi	Apikasi terintegrasi dengan e-TPP dan e-SKP	Jangka Pendek	2 Laporan	Rp 174.135.000	1 Laporan	Rp62.000.000	APBD	BKPSDM
--	--	-------------------------------	---	---------------	-----------	----------------	-----------	--------------	------	--------

angat penting karena citra tersebut akan menjadi representasi dari daerah yang
 branding dibangun untuk meningkatkan citra dan nama besar daerah melalui
 akan membentuk bagaimana Kabupaten Maros akan dikenal dan dikenal melalui
 di jagad maya. Peta jalan pengembangan smart branding jangka pendek, menengah,
 dan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Peta Jalan 2023-2032

Tahun	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Leading Sector
	2023	2024	2025	2026		
angka panjang	650.000 Orang	650.000 Orang	650.000 Orang	650.000 Orang	DAK dan DAU	DISPAR PORA & DISKOP UMDA G
	700.000 Orang	700.000 Orang	700.000 Orang	750.000 Orang	DAK dan DAU	DISPAR PORA & DISKOP UMDA G

Inovasi	Status Inovasi	2023		2024		2025		2026		2027		Sumber Dana	Kategori
		Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja		
Bimbingan pembuatan paket wisata dan wisata tematik	Jangka Menengah	2 hari	Rp1.200.000	2 hari	Rp2.000.000	2 hari	Rp3.000.000	2 hari	Rp3.000.000	2 hari	Rp3.000.000	DAK, DAU	DISPARP ORA & DISKOMI NFO
Penguatan Desa wisata melalui jejaring desa wisata khusus Kab. Maros	Jangka Menengah	80 %	Rp1.200.000	80 %	Rp2.000.000	80 %	Rp3.000.000	80 %	Rp3.000.000	80 %	Rp3.000.000	DAK, DAU	DISPARP ORA & PEMERI NTAH KECAMA TAN
Melaksanakan penyusunan Kajian Investment Project Ready to Offer (IPRO) Dokumen mengenai data investasi	Jangka Menengah	130 Investor	Rp360.000	130 Investor	Rp360.000	130 Investor	Rp360.000	130 Investor	Rp360.000	130 Investor	Rp360.000	DAU	DPMPPTSP
Pembuatan Aplikasi Informasi Investasi di Kabupaten Maros	Jangka Menengah	12,06%	Rp136.000	12,06%	Rp177.500	12,06%	Rp215.000	12,06%	Rp215.000	12,06%	Rp215.000	DAU	DPMPPTSP

Tingkat Prestasi bisnis per 100.000 penduduk	Sport Tourism	Jangka Pendek	80 %	Rp200.000.000	80 %	Rp300.000.000	DAK dan DAU	DISPARPORA & PEMERINTAH KECAMATAN	
<p style="text-align: center;">  Target Kinerja/Amalgamasi (Ratun Lela Pabean) 2023 </p>									
<p style="text-align: center;"> Inovasi Status Inovasi </p>									
Persentase layanan menyediakan kota yang buat kebijakan terbuka	Melakukan Promosi potensi investasi Pada Peta Potensi ke m edia Sosial	Jangka Pendek	1 Dokumen	Rp230.000.000	1 Kegiatan	Rp230.000.000	DAU	DPMPPTSP	
Persentase bayaran ke kota dibayar secara elektronik asalkan faktor elektronik	Membuat Aplikasi Pelaporan Online Data Perusahaan	Jangka Pendek	231 Perusahaan	Rp825.000.000	231 Perusahaan	Rp825.000.000	DAK	DPMPPTSP	
Persentase rekreasi yang dapat dijadikan sangat menarik	Maros Excotic place Aplikasi	Quick Win	650.000 orang	Rp1.000.000.000	1.000.000 orang	Rp1.000.000.000	DAK	DISPARPORA	

guna tata kelola perekonomian yang pintar sehingga dapat mewujudkan ekosistem yang tangguh di era digitalisasi yang disruptif. Dengan demikian bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan perekonomian masyarakat diimbangi dengan pengelolaan sektor ekonomi unggulan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang mandiri serta berkelanjutan dalam meningkatkan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan program-program ekonomi yang terus dikembangkan secara berkelanjutan. Lebih jauh lagi, smart economy akan didukung melalui digitalisasi, memiliki akses terhadap permodalan, serta mendorong pertumbuhan smart economy jangka pendek, menengah, panjang, serta quick wins sebagai berikut:

Smart Economy Tahun 2023-2032

Kategori	2023		2024		2025		2026		2027		Sumber Dana	Leading Sector
	TARGET KINERJA	Anggaran	TARGET KINERJA	Anggaran	TARGET KINERJA	Anggaran	TARGET KINERJA	Anggaran	TARGET KINERJA	Anggaran		
Infrastruktur, Industri, dan Perdagangan	55%	Rp2.000.000.000	70%	Rp2.000.000.000	75%	Rp2.000.000.000	80%	Rp2.000.000.000	80%	Rp2.000.000.000	APBD	DISKOPUK, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	82%	Rp2.200.000.000	82%	Rp2.200.000.000	85%	Rp2.200.000.000	85%	Rp2.410.000.000	87%	Rp2.410.000.000	APBD	DISKOPUK, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Indikator Kinerja	Indikator SNI 5/122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam jutaan rupiah)					Sumber Dana	Leading Sector		
				2023	2024	2025	2026	2027				
Ketersediaan Pangan Utama	16.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	Penyediaan Lumbung Pangan lokal	Jangka Panjang	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	10 Unit	Rp1.000.000.000.000	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Target Anggaran	Target Anggaran	Target Anggaran	Target Anggaran	Target Anggaran	Target Anggaran	Target Anggaran	10 Unit	Rp1.000.000.000.000
				Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	12 Unit	Rp1.100.000.000.000	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Target Anggaran	Target Anggaran	Target Anggaran	Target Anggaran	Target Anggaran	12 Unit	Rp1.100.000.000.000		
				Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	15 Unit	Rp1.250.000.000.000	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Target Anggaran	Target Anggaran	Target Anggaran	Target Anggaran	Target Anggaran	15 Unit	Rp1.250.000.000.000		

Jangka Menengah Smart Economy Tahun 2023-2027

No / Indikator Kinerja	Indikator SWI 37122	Status Inovasi	Target Kinerja/ Anggaran (dalam juta rupiah)					Sumber Dana				
			2023		2024		2025					
			Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja		Anggaran			
1.3 Persentase tenaga kerja yang bekerja di Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	Jangka Menengah	2 Unit	Rp120.000.000	2 Unit	Rp120.000.000	2 Unit	Rp120.000.000	-	-	APBD, APBN, dsb	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Jumlah koperasi yang memiliki izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam	Jangka Menengah	2 Unit	Rp60.000.000	2 Unit	Rp60.000.000	2 Unit	Rp60.000.000	-	-	APBD, APBN, dsb	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Jumlah Koperasi berkualitas	Jangka Menengah	71,62%	Rp346.500.000	72,27%	Rp346.500.000	73,58%	Rp346.500.000	-	-	APBD, APBN, dsb	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Simpanan yang diminta secara daring lainnya	Jangka Menengah	71,62%	Rp346.500.000	72,27%	Rp346.500.000	73,58%	Rp346.500.000	-	-	APBD, APBN, dsb	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)											
2023		2024		2025		2026		2027		Sumber Dana	
Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
56 Unit	Rp229.130.000	56 Unit	Rp229.130.000	56 Unit	Rp229.130.000	56 Unit	Rp229.130.000			APBD, APBN, dsb	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
10 Unit Jsaha	Rp100.000.000	10 Unit Jsaha	Rp125.000.000	25 Unit Jsaha	Rp130.000.000					APBD	Dinas Perikanan
100%	Rp535.200.000	100%	Rp535.200.000	100%	Rp535.200.000	100%	Rp535.200.000	100%	Rp535.200.000	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Belayanan pendaftaran Usaha/Nomor induk Koperasi/NIB. *) Belayanan Pelaku Usaha pemilik alat JTPP yang berisi okasi usaha bentuk peta, dan menunjukkan titik okasi), dan memuat informasi jenis usaha, jenis alat, awal tera/teradial, untuk memudahkan pengawasan	243 Rp11.508 laporan (1 585.000 laporan perhari kerja)	243 laporan (1 585.000 laporan perhari kerja)	Rp11. 508. 11.508.000	243 laporan (1 585.000 laporan perhari kerja)	Rp11.508. Rp11.508.	243 laporan (1 585.000 laporan perhari kerja)	Rp93.870.		A PBD, A PBN, dsb	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
---	---	---	-------------------------------------	---	-----------------------------------	---	-----------	--	-------------------------	---

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SWI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Leading Sector
					2023	2024	2025	2026		
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
giatan Penyediaan dan Penyaluran pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilitas pasokan dan Harga Pangan	Jumlah jenis informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah yang tersedia	16.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	Penyediaan Aplikasi/Informasi Harga dan Aplikasi Berbasis MAP akses Pangan	angka Menengah	Laporan Harga 11 (komoditi)	Rp90.000.000	Laporan Harga 11 (komoditi)	Rp90.000.000	Laporan Harga 11 (komoditi)	Rp90.000.000
ngelolaan mbudidaya ikan	jumlah kelompok ikan pembudidaya yang difasilitasi untuk mengelola ikan dengan baik dan benar	16.1 Persentase ahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	Aplikasi Saprodi Budidaya, termasuk informasi jadwal panen dan harga	Jangka Menengah	80 klip	Rp130.000.000	80 klip	Rp155.000.000	80 klip	Rp180.000.000
nganan awanan gan Kewenangan upaten/Kota	jumlah desa/kelurahan awan pangan yang tertangani	16.1 Persentase ahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	Penyediaan Aplikasi Kerawanan Pangan Berbasis SIG	Jangka Menengah	14 Kecamatan	Rp19.000.000	14 Kecamatan	Rp19.000.000	14 Kecamatan	Rp19.000.000

Kategori	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SWI 37/22	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja (dari Rincian)				Sumber Dana		Kendala dan Hambatan				
						2023		2024		2025			2026		2027	
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
Manfaat teknologi untuk menciptakan nilai	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	16.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	Peningkatan Aplikasi LP2B Berbasis SIG (Sistem Informasi Geografis)	Jangka Menengah	14 Kecamatan	Rp12.584.000	14 Kecamatan	Rp12.584.000	14 Kecamatan	Rp12.584.000	14 Kecamatan	Rp686.460.000	Rp686.460.000	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota	umlah nelayan yang diberdayakan dan mengalami peningkatan kualitas dan kapasitasnya	1.3 Persentase tenaga kerja yang bekerja di Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Peningkatan Aplikasi data statistik produksi hasil nelayan	Jangka Menengah	180 orang	Rp145.000.000	240 orang	Rp160.000.000	240 orang	Rp170.000.000	300 orang	Rp190.000.000	Rp180.000.000	APBD, APBN	Dinas Perikanan

Smart Economy Tahun 2023-2024

No / Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)		Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Sumber Dana	Dinas
				2023	2024					
1. Jumlah jenis produk ekspor unggulan yang dipromosikan melalui pameran daganga dan misi dagang	1.3 Persentase tenaga kerja yang bekerja di Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Melakukan pameran melalui media sosial/media virtual	Jangka Pendek	10 Jenis	10 Jenis	Rp2.081.093.900	10 Jenis	Rp2.081.093.900	APBD, APBDN, dsb	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Industri
2. Jumlah unit usaha yang memiliki izin PPLH yang berada dalam pengawasan pemerintah Kabupaten	6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Terkelolanya pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha secara online	Jangka Pendek	30	30	Rp200.000.000	30	Rp200.000.000	APBD	DPKPLH
3. Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola dengan baik	5.2 Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	Menyediakan sistem/alat pembayaran retribusi secara non tunai dengan e-money	Jangka Pendek	25 Unit	25 Unit	Rp10.510.500	25 Unit	Rp10.510.500	APBD, APBDN, dsb	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Industri

Sub-Otomansi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37:122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)		Sumber Dana	Sektor		
							2023	2024				
							Target Kinerja	Anggaran				
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengurus koperasi yang memiliki peningkatan kualitas dan kapasitas	1.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengurus Koperasi agar dapat bekerja lebih produktif dan kreatif dalam melakukan diversifikasi produk, perluasan pemasaran, dan kemasan yang up-to-date, dsb	Jangka Pendek	100 orang	Rp346.500.000	1.000 orang	Rp346.500.000	APBD, APBN, dsb	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang memperoleh perlindungan usaha dan pemberdayaan kopeasi	1.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Memberdayakan koperasi dan memberikan perlindungan koperasi khususnya KSP/USP melalui kerja sama dengan lembaga penjamin simpanan bagi anggota koperasi agar dapat terus berkembang dan tidak mengalami stagnasi usaha	Jangka Pendek	50 unit	Rp75.000.000	50 unit	Rp75.000.000	APBD, APBN, dsb	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Sub Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perengkapan Ditera Ulang	6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Peningkatan layanan tera/tera ulang dengan membuat aplikasi khusus metrologi legal untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan jasa layanan tera/tera ulang, misalnya pada saat mengajukan permohonan tera/tera ulang bisa melalui aplikasi dan tidak harus ke kantor, dan langsung direspon oleh Penera	Jangka Pendek	943 Unit Alat UTPP	Rp686.460.000	943 Unit Alat UTPP	Rp686.460.000	APBD, APBN, dsb	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah usaha pengolahan yang mendapatkan pembinaan tentang mutu dan keamanan hasil perikanan	1.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Aplikasi bina mutu hasil perikanan	Jangka Pendek	32 Unit Usaha	Rp100.000.000	32 Unit Usaha	Rp125.000.000	APBD	Dinas Perikanan
		Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Jumlah Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya menjadi usaha kecil melalui pelatihan pengembangan produksi dan pengeolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	1.3 Persentase tenaga kerja yang bekerja di Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	(UMKM Naik Kelas) membantu UMKM dalam peningkatan skala usahanya menjadi usaha kecil melalui pelatihan pengembangan produksi dan pengeolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi berbasis IT/Aplikasi/Web	Jangka Pendek	150 Unit UMKM	Rp500.000.000	150 Unit UMKM	Rp500.000.000	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Sub-Sytemis	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Wording Subot
							2025		2026			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
	2. Menciptakan gerakan mencintai produk lokal untuk peningkatan konsumsi produk lokal	Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Jumlah pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	16.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	Penggunaan teknologi pembantuan (pengkerdilan) untuk peningkatan produksi budidaya tambak	Jangka Pendek	20 kip	Rp2.670.000.000	25 kip	Rp3.175.000.000	APBD	Dinas Perikanan
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	16.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	Penyediaan Data Hasil Pekarangan Pangan Lestari Melalui Aplikasi	Jangka Pendek	14 KWT	Rp978.860.000	14 KWT	Rp1.038.860.000	APBD	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular		Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	16.1 Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	Pembentukan Tim Tanggap Penyakit Hewan Menular	Jangka Pendek	14 Kecamatan	Rp550.750.000	14 Kecamatan	Rp550.750.000	APBD	Dinas Kesehatan	
Pembentukan Badan Usaha Milik Petani		Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	1.2 Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Mendorong perbup terkait pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jangka Pendek	14 Kecamatan	Rp12.584.000	14 Kecamatan	Rp12.584.000	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)				Sektor	
							2023		2024			Sumber Dana
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Ekosistem Transaksi Keuangan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk menciptakan transaksi non tunai	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah produksi penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat dilusahkan alam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1.3 Persentase tenaga kerja yang bekerja di Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Aplikasi Ne Layan Pintar	Jangka pendek	3400 ton	Rp1.720.000.000	3600 ton	Rp1.725.000.000	APBD	
							1 Unit	Rp90.000.000	1 Unit	Rp100.000.000	APBD	Dinas Perikanan
							100%	Rp535.200.000	100%	Rp535.200.000	APBD	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

V.4. Peta Jalan Smart Living

Smart Living menitikberatkan pada harmonisasi tata ruang dan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Selain itu juga menjamin fasilitas dan pelayanan kesehatan dengan mempermudah akses terhadap sarana dan prasarana maupun layanan kesehatan. Lebih jauh lagi, membangun sarana transportasi dan logistik dalam rangka pemenuhan kebutuhan individu maupun publik. Dimensi ini mendukung adanya kebutuhan sarana dan prasarana fisik dalam menunjang kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Maros. Peta jalan pengembangan smart living jangka pendek, menengah, panjang, serta quick wins Kabupaten Maros dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel V - 10 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Living Tahun 2023-2032

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SMI (3/122)	Indikasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector				
							2023	2024		2025		2026		2027								
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran				
Inovasi Jangka Panjang Dimensi Smart Living		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan	7.1 Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan 7.2 Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk	Maros Telemedicine (Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan serta Meningkatkan Layanan Kesehatan Masyarakat miskin difasilitas Kesehatan)	Jangka Panjang	100%	49.000.000.000	100%	53.000.000.000	100%	57.000.000.000	100%	61.000.000.000	100%	61.000.000.000	100%	61.000.000.000	100%	61.000.000.000	APBD dan Investasi	Dinkes dan RSUD
							2028	2029		2030		2031		2032		Sumber Dana		Leading Sector				
							100%	65.000.000.000	100%	65.000.000.000	100%	69.000.000.000	100%	69.000.000.000	100%	73.000.000.000	100%	73.000.000.000	APBD	Dinkes dan RSUD		

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SN 37922	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024		2025		2026		2027			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Transportasi	Revitalisasi sarana dan prasarana transportasi publik	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersedia	15.5 Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (real-time) yang dapat diakses publik 15.12 Persentase rute angkutan umum dengan konektivitas internet yang disediakan kota dan/atau dikelola untuk komuter	Aplikasi penyedia informasi terkait moda transportasi berupa halte, terminal rest area	Jangka Menengah	7 Jenis	Rp29.592.000.000,00	7 Jenis	Rp29.592.000.000,00	7 Jenis	Rp29.592.000.000,00	7 Jenis	Rp29.592.000.000,00	-	Rp29.592.000.000,00	APBD	DINAS PUTRPP
							1 Unit	Rp430.000.000,00	1 Unit	Rp410.000.000,00	1 Unit	Rp410.000.000,00	1 Unit	Rp410.000.000,00	-	Rp410.000.000,00	APBD	DINAS PUTRPP
							40 Lokasi	Rp10.200.000,00	40 Lokasi	Rp15.000.000,00	40 Lokasi	Rp15.000.000,00	40 Lokasi	Rp15.000.000,00	-	Rp15.000.000,00	APBD	DINAS PUTRPP
							5000 Unit	Rp73.000.000,00	5000 Unit	Rp5.760.000.000,00	5000 Unit	Rp5.760.000.000,00	5000 Unit	Rp5.760.000.000,00	-	Rp5.760.000.000,00	APBD	DINAS PUTRPP
							4 Kegiatan	Rp470.000.000,00	4 Kegiatan	Rp400.000.000,00	4 Kegiatan	Rp400.000.000,00	4 Kegiatan	Rp400.000.000,00	-	Rp400.000.000,00	APBD	DINAS PUTRPP
							30 Rekomendasi	Rp80.000.000,00	30 Rekomendasi	Rp230.000.000,00	30 Rekomendasi	Rp230.000.000,00	30 Rekomendasi	Rp230.000.000,00	-	Rp230.000.000,00	APBD	DINAS PUTRPP
							30 Rekomendasi	Rp80.000.000,00	30 Rekomendasi	Rp230.000.000,00	30 Rekomendasi	Rp230.000.000,00	30 Rekomendasi	Rp230.000.000,00	-	Rp230.000.000,00	APBD	DINAS PUTRPP
							30 Rekomendasi	Rp80.000.000,00	30 Rekomendasi	Rp230.000.000,00	30 Rekomendasi	Rp230.000.000,00	30 Rekomendasi	Rp230.000.000,00	-	Rp230.000.000,00	APBD	DINAS PUTRPP
							30 Rekomendasi	Rp80.000.000,00	30 Rekomendasi	Rp230.000.000,00	30 Rekomendasi	Rp230.000.000,00	30 Rekomendasi	Rp230.000.000,00	-	Rp230.000.000,00	APBD	DINAS PUTRPP
							30 Rekomendasi	Rp80.000.000,00	30 Rekomendasi	Rp230.000.000,00	30 Rekomendasi	Rp230.000.000,00	30 Rekomendasi	Rp230.000.000,00	-	Rp230.000.000,00	APBD	DINAS PUTRPP

Sub Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)						Sumber Dana	Leading Sector				
							2023		2024		2025				2026		2027	
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran			Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
		Jalan Kabupaten/ Kota																
		Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Angkutan Umum yang Memenuhi Standar				1 Unit	Rp1.515.000.000,00	1 Unit	Rp1.515.000.000,00	1 Unit	Rp1.515.000.000,00	1 Unit	Rp1.515.000.000,00	-	DINAS PUTRPP		

Sub Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)						Sumber Dana	Leading Sector				
						2023		2024		2025				2026		2027	
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran			Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
Harmonisasi Tata Ruang	Penguatan kapasitas pemerintah desa untuk pengembangan data dan mempercepat penangan Kawasan layak huni	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Luas pemanfaatan lahan yang ditetapkan dalam RTRW dan RTRR	6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Jangka Pendek											DINAS PUTRPP	
		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Luas Areal Ruang Daerah perencanaannya sesuai dengan peruntukan			6600 Ha	Rp794.692.000,00	6650 Ha	6650 Ha	6650 Ha	Rp920.000.000,00	6650 Ha	Rp1.150.000.000,00	6650 Ha	Rp1.017.782.000,00	APBD	DINAS PUTRPP

Ditjen	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 3322	Inovasi	Status Inovasi	Tetapan Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)		Sumber Dana	Dinas		
							2023				2024	
							Tetapan Kinerja	Anggaran			Tetapan Kinerja	Anggaran
		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Luas Areal Ruang Daerah yang dimanfaatkan sesuai dengan rencana peruntukan				6600 Ha	Rp323.700.000,00	APBD	DINAS PUTRPP		
							6600 Ha	Rp504.736.000,00	APBD	DINAS PUTRPP		
Kesehatan	Peningkatan sarana prasarana kesehatan modern dengan basis teknologi untuk pelayanan penduduk Maros dan meraih konsumen diluar Maros	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	7.1 Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	Aplikasi SIMRS, Sisirut, Vclaim, Sirsoline Kemenkes (Ketersediaan Informasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan yang telah berizin) Terintegrasi dengan sistem .BPS	Jangka Pendek	15 Unit	169.857.299.142	APBD	DINKES		
							100%	42.655.002.534	APBD	DINKES & DISKOMINFO STAPER		
		Penyelenggaraan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesehatan yang disediakan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100%	2.227.662.433	APBD	DINKES & DISKOMINFO STAPER		
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah jenis data informasi kesehatan yang dikelola dalam sistem informasi kesehatan				100%	2.227.662.433	APBD	DINKES & DISKOMINFO STAPER		

Sub Program	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Indikasi	Status (Inop/Pl)	Target Kinerja/ Anggaran (dalam juta rupiah)		Target Kinerja	Anggaran	APBD	DINKES & DISKOMINFO STAPER
						2023	2024				
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Jumlah Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan				100%	342.000.000	100%	342.000.000	APBD	DINAS & DISKOMINFO STAPER
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Presentase Fasilitas Kesehatan Yang Memiliki Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman sesuai jumlah dan mutu				100%	399.269.679	100%	429.900.743	APBD	Dinas Kesehatan/RSU D
Transportasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar pelayanan	7.1 Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	E- Rekam Medik	Quick Win	100%	49.000.000.000	100%	53.000.000.000	APBD	Dinas Kesehatan/RSU D
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	15.9 Persentase lampu lalu lintas yang cerdas	Aplikasi Sistem Informasi PJU	Quick Win	179 Unit	Rp110.000.000,00	179 Unit	Rp110.000.000,00	APBD	DINAS PUTRPP

Subdimensi/Strategi	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SMI 3.122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)						Sumber Dana	Leading Sector				
						2023		2024		2025				2026		2027	
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran			Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
Menjamin Keselamatan Masyarakat	Penguatan kapasitas masyarakat desa dalam mencegah terjadinya bencana dan menghadapi kejadian bencana (Desa tanggap bencana)	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	8.1 Persentase rumah tangga dengan pengukur energi pintar	Penggunaan robot mapiing wilayah terdampak dan menghitung rasio kerugian	Jangka Panjang	14	Rp154,88	14	Rp154,88	14	Rp154,88	14	Rp156,00	14	Rp156,00	APBD	BPBD
						Kecamat an	3.250	Kecamat an	3.250	Kecamat an	3.250	Kecamat an	00.000	Kecamat an	00.000	APBD	BPBD
						14	Rp159,00	14	Rp159,00	14	Rp159,00	14	Rp163,00	14	Rp163,00	APBD	BPBD
						Kecamat an	0.000	Kecamat an	0.000	Kecamat an	0.000	Kecamat an	00.000	Kecamat an	00.000	APBD	BPBD
						20	Rp71,500	20	Rp71,500	20	Rp71,500	20	Rp75,00	20	Rp75,00	APBD	BPBD
						Kegiatan	.000	Kegiatan	.000	Kegiatan	.000	Kegiatan	0.000	Kegiatan	0.000	APBD	BPBD
						20	Rp79,000	20	Rp79,000	20	Rp79,000	20	Rp84,00	20	Rp84,00	APBD	BPBD
						Kegiatan	.000	Kegiatan	.000	Kegiatan	.000	Kegiatan	0.000	Kegiatan	0.000	APBD	BPBD

2023	2024	2025	2026	2027	2027		Sekretaris Daerah	Logo
					Anggaran Kinerja	Anggaran		
200 Paket	Rp192.700.000 Paket	200 Paket	Rp192.700.000 Paket	225 Paket	Rp216.787.000 Paket	Rp216.787.000 Paket	APBD	BPBD
2028	2029	2030	2031	2032			Sekretaris Daerah	Logo
250 Paket	Rp238.466.000 Paket	250 Paket	Rp238.466.000 Paket	275 Paket	Rp262.313.000 Paket	Rp262.313.000 Paket	APBD	BPBD

Tabel V - 14 Peta Jalan Jangka Menengah Smart Society Tahun 2023-2027

Indikator	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rasio KDRT	6.3 Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	Transformasi Layanan Edukasi dan Informasi bagi remaja dan anak berbasis Inklusi	Jangka Menengah	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)		Sulawesi Tengah	Logo
							2023	2027		
Interaksi Masyarakat	Revitalisasi kearifan lokal masyarakat untuk pengembangan interkasi sosial yang sehat dalam masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis kelembagaan tingkat desa	Program Peningkatan Kualitas Keluarga,Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang	Rasio KDRT	6.3 Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	Transformasi Layanan Edukasi dan Informasi bagi remaja dan anak berbasis Inklusi	Jangka Menengah	0,02 %	Rp100.000.000	APBD/APBN	DP3ADAL DUKES, DESA-KE LURHAAN, MANPU BAKT, FORUM ANAK, DUTA GENRE
							0,02 %	Rp100.000.000	BN	

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Lead Sector
							2023		2024		2025		2026		2027			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Ekosistem belajar pendidikan	Penguatan kapasitas berbagai Lembaga yang terkait dengan Pendidikan untuk gerakan digitalisasi sekolah	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.	Persentase Masyarakat PMKS /PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial	6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pengelolaan dan Pengembangan data dengan sistem Citra Satelit	Jangka Menengah	100 %	Rp2.150.000.000	100 %	Rp2.200.000.000	100%	Rp2.300.000.000	100%	Rp2.355.000.000	100 %	Rp2.355.000.000	APBD	Dinsos
		Kegiatan : 1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar.	Persentase Penduduk Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar	2.2 Jumlah komputer, tablet laptop, tablet atau perangkat pembelajaran digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa	Program Sekolah Penggerak/Smart School (jangka panjang)	Jangka Menengah	2 Sekolah	Rp159.422.000	3 Sekolah	Rp162.622.000	4 Sekolah	Rp127.672.000	4 Sekolah	Rp127.672.000	5 Sekolah	Rp127.672.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Kegiatan : 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Penduduk Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					2 Sekolah	Rp77.175.000	3 Sekolah	Rp78.830.000	4 Sekolah	Rp78.830.000	4 Sekolah	Rp78.830.000	5 Sekolah	Rp78.830.000	APBD
		Kegiatan : 3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Penduduk Usia 4-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini			1 Sekolah	Rp15.345.000	2 Sekolah	Rp15.345.000	3 Sekolah	Rp15.345.000	3 Sekolah	Rp15.345.000	4 Sekolah	Rp15.345.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Sub-Dimensi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SIF 3/1/22	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)					APBD	DPMPTSP K				
					2023	2024	2025	2026	2027						
					Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja			Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
Menjamin Keselamatan Masyarakat	Penguatan kapasitas masyarakat desa dalam mencegah terjadinya bencana dan menghadapi kejadian bencana (Desa tanggap bencana)	Jumlah pencari kerja yang mengikuti Informasi Bursa Kerja dan Bursa Kerja Khusus (BKK)	6.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Inovasi	Jangka Menengah	1.245	Rp350.000.000	1.245	Rp350.000.000	1.265	Rp350.000.000	1.270	Rp350.000.000	APBD U	DPMPTSP K
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati (Menurun)	17.1 Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	Apikasi Pencari Kerja Online (Seperti Sistem Linked in khusus di Kabupaten Maros melalui kerja sama dengan perusahaan atau lembaga pencari kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan)	Jangka Menengah	143 Kasus	Rp1.033.744.000	120 Kasus	Rp927.744.000	100 Kasus	Rp927.744.000	80 Kasus	Rp927.744.000	APBD U	Satpol-PP dan Damkar

Sub-Direksi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SMI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)					Sumber Dana	Leading Sector			
							2023		2025		2026			2027		
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja			Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
					RINGAN / TIPIRING)											
		Penguatan kelembagaan bencana kabupaten/kota	Jumlah Desa Tangguh Bencana	17.1 Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	Desa Tangguh Bencana	Jangka Menengah	10	Rp94.350.000	10	Rp94.350.000	14	Rp132.090.000	14	Rp132.090.000	APBD	BPBD
		Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang diminta secara daring	Big Data Kebencanaan	Jangka Menengah	1 sistem	Rp163.400.000	1	Rp163.400.000	1	Rp165.000.000	1	Rp165.000.000	APBD	BPBD
		Kerjasama antar lembaga dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 sistem	Rp22.500.000	1	Rp22.500.000	1	Rp25.000.000	1	Rp25.000.000	APBD	BPBD

Pelayanan informasi bencana rawan kabupaten/kota	Informasi bencana rawan bencana informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat	Sistem informasi bencana berupa peringatan sebelum bencana	Jangka Menengah	391774 orang	Rp62.537.000	391.774	Rp62.537.000	391.774	Rp62.537.000	391.774	Rp70.000.000	391.774	Rp70.000.000	APBD	BPBD
--	--	--	--	-----------------	--------------	--------------	---------	--------------	---------	--------------	---------	--------------	---------	--------------	------	------

Zona	Materi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam jutaan/bulan)				Sumber Dana	Kendali Sektor				
							2023	2024	2025	2026			2027			
			Indikator Kinerja	Indikator SNI	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKL) Setiap Tahunnya	17.1 Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	WARGA SIAGA BRASTA DAHANA (peningkatan masyarakat dalam mencegah, mendeteksi dini dan melakukan pemadaman awal kebakaran) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Kebakaran (REDKAR) Desa/Kelurahan (Kecamatan Bantimurung Desa Mangaloreng dan Alatengae)	Jangka Menengah	8 Desa/ Kelurahan	Rp1.020.885.000	20 Desa/ Kelurahan	Rp1.020.885.000	20 Desa/ Kelurahan	Rp1.020.885.000	20 Desa/ Kelurahan	Rp1.020.885.000	APBD/DA U	Satpol-PP dan Damkar

Sub Dimensi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)					Sumber Dana				
						2023	2024	2025	2026	2027					
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja		Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggal	6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan diaksesi yang dapat diminta secara daring	Pemasangan sensor-sensor yang mampu mendeteksi potensi bencana: banjir, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung dan longsor	Jangka Menengah	93.331	Rp17.400.000	93.331	Rp17.400.000	93.331	Rp17.400.000	-	-	APBD	BPBD

Tabel V - 15 Peta Jalan Jangka Pendek Smart Society Tahun 2023-2024

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SN 37/122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)		Sambutan Dana	Lokasi
							2023	2024		
							Target Kinerja	Anggaran		
Interaksi Masyarakat	Revitalisasi kearifan lokal masyarakat untuk pengembangan interaksi sosial yang sehat dalam masyarakat melalui pemanfaatan teknologi berbasis informasi berbasis kelembagaan tingkat desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Pembinaan terhadap LSM dan Ormas. Indikator Kegiatan :Jumlah Ormas yang mendapatkan pembinaan Peningkatan kapasitas organisasi	6.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	Pengembangan Fitur Aplikasi Siola Ormas (Organisasi Kemasyarakatan)	Jangka Pendek	17%	Rp310.000.000	APBD	BAKESBANGPOL
							19%	Rp340.000.000	APBD	BAKESBANGPOL
Interaksi Masyarakat	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase Masyarakat Yang Terhadap Demokrasi, Etika Dan Budaya Politik	6.1. Jumlah kunjungan daring ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	Uji Kompetensi Bagi Kader Perempuan Partai Politik	Jangka Pendek	20%	Rp935.000.000	APBD	BAKESBANGPOL	
						20%	Rp975.000.000	APBD	BAKESBANGPOL	

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Urum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik										
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL / Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Masyarakat PMKS /PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial	6.3 Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)	Sistem layanan aduan dan penanganan PPKS terpadu	Jangka Pendek	100%	Rp100.000.000	100%	Rp50.000.000	APBD	Dhsos
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan terhadap LSM dan Ormas. Indikator Kegiatan :Jumlah Ormas yang mendapatkan pembinaan Peningkatan kapasitas organisasi	6.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	Membuat Aplikasi Sistem Pendaftaran dan Pengaduan terkait Aduan dan pendaftaran Ormas	Jangka Pendek	17%	Rp310.000.000	19%	Rp340.000.000	APBD	BAKESBANGPOL

Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	13.3 Jumlah buku perpustakaan umum dan judul e-book per 100.000 penduduk	Layanan Perpustakaan Elektronik (E-Book)	Quick Win	1 layanan (150 eksamplar)	Rp15.000.000	1 layanan (200 eksamplar)	Rp20.000.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	13.4 Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif	Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Quick Win	9 perpustakaan per tahun	Rp164.000.000	9 perpustakaan per tahun	Rp164.000.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub-Dimensi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SN 57/122 Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam Rp. Rupiah)		Sumber Dana (dalam Rp. Rupiah)	
					2023 Target Kinerja Anggaran	2024 Target Kinerja Anggaran	2023 Target Kinerja Anggaran	2024 Target Kinerja Anggaran
Menjamin Keselamatan Masyarakat	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	17.1 Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	Jangka Pendek	93.331	Rp17.400.000	93.331	Rp17.400.000
					1	Rp163.400.000	1	Rp163.400.000
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Pengendalian Operasi Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang diminta secara daring	Jangka Pendek	1	Rp163.400.000	1	Rp163.400.000
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Pencegahan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang diminta secara daring	Jangka Pendek	6 Jenis	N/A	6 Jenis	Rp11.427.455.000
								APBD
								APBD
								APBD/DAU
								Satpol-PP dan Damkar

Subs Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SMI	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Angekan (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Landing Site
							2023		2024			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Kegiatan :Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Presentase Pembinaan terhadap aparaturnya dan masyarakat dalam mengantisipasi konflik. Indikator Kegiatan : Jumlah masyarakat yang mendapat pembinaan dalam penanganan konflik	6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pembentukan Kader Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial	Jangka Pendek	20%	Rp815.000.000	20%	Rp85.000.000	APBD	BAKESBANGPOL
		Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	6.3 Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan nondarurat kota (hari)	Call Center Kebencanaan	Jangka Pendek	150	Rp133.355.000	150	Rp133.355.000	APBD	BPBD
		Penyediaan perlindungan keselamatan terhadap bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	4.1 Persentase bangunan yang dibangun atau diperbaharui dalam 5 tahun terakhir sesuai dengan prinsip- prinsip bangunan hijau	Ransel darurat di rumah/ gedung pemerintahan	Jangka Pendek	50	Rp120.000.000	50	Rp120.000.000	APBD	BPBD

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Leading Sector
							2023		2024			
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Kekerifangan)	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik (Air Bersih)	4.1 Persentase bangunan yang dibangun atau diperbaharui dalam 5 tahun terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip bangunan hijau	Pengadaan penampungan/tangki air bersih untuk mengatasi kekerifangan dengan skema kerjasama (MoU) bersama stake holder di Kab. Maros.	Jangka Pendek	1	Rp440.000.000	1	Rp440.000.000	APBD	BPBD
		Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Jumlah penduduk pada kawasan rawan bencana yang mendapatkan informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	PUSDALOPS (Pusat Pengendalian Data dan Operasi)	Quick Win	391.774 Orang	Rp62.537.000	391.774 Orang	Rp62.537.000	APBD	BPBD
		Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	6.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan diminta secara daring	Kurikulum pelatihan dan mitigasi bencana melalui kelas online atau akun influencer	Quick Win	100 Orang	Rp78.200.000	100 Orang	Rp78.200.000	APBD	BPBD

Sub-Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator 3/122	SNI	Istisna	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)		Sumber Dana	Leaving Sector		
								2023				2024	
								Target Kinerja	Anggaran				
		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui deteksi dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan dan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	6.3 Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan nondarurat kota (hari)		'Paras Manis' ini yaitu Polisi Pamong Praja Siap Melayani dan Mengayomi masyarakat dengan Humanis yang bernuansa Hak Asasi Manusia" untuk menurunkan persepsi masyarakat terhadap Satpol PP hanya tukang gusur pasar, Razia dan Arogan.	Quick Win	365 Kasus	Rp11.658.946,000	365 Kasus	Rp11.193.946,000	APBD/DAU	Satpol-PP dan Damkar

V.6. Peta Jalan Smart Environment

Dalam pembangunannya, smart environment memiliki pilar untuk melakukan perlindungan lingkungan dengan mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya alam. Selain itu juga melakukan pengelolaan terhadap sampah dan limbah dengan mengembangkan sistem dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan, serta pembangunan tata kelola energi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan mengembangkan energi alternatif ramah lingkungan. Dimensi ini menyiratkan konsep pembangunan daerah harus selaras dengan konservasi lingkungan hidup. Dimensi ini menemukan sinergisitas pembangunan dan pelestarian lingkungan melalui program pembangunan yang berkelanjutan dengan risiko kerusakan alam yang minimal. Peta jalan pengembangan smart environment jangka pendek, menengah, panjang, serta quick wins Kabupaten Maros dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel V - 16 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Environment Tahun 2023-2032

Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam jutaan rupiah)						Sumber Dana	Leadline Sector				
							2023		2024		2025				2026		2027	
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran			Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
Inovasi Jangka Panjang Dimensi Smart Environment	Program Pengelolaan sampah terpadu	Persentase sampah yang telah diolah menjadi bernilai tambah	12.3 Persentase jumlah total sampah di kota yang digunakan untuk menghasilkan energi	12.3 Persentase jumlah total sampah di kota yang digunakan untuk menghasilkan energi	Ubah Sampah Menjadi Emas	Jangka Panjang	5%	1.000.000.000	10%	1.000.000.000	15%	1.000.000.000	20%	1.000.000.000	25%	1.000.000.000	APBD	DPKPLH
							2023	2024	2025	2026	2027							
Inovasi Jangka Panjang Dimensi Smart Environment	Program Pengelolaan sampah terpadu	Persentase sampah yang telah diolah menjadi bernilai tambah	12.4 Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota	12.4 Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota	Menjadi Emas	Jangka Panjang	25%	1.000.000.000	30%	1.100.000.000	30%	1.100.000.000	30%	1.100.000.000	35%	1.250.000.000	APBD	DPKPLH
							2023	2024	2025	2026	2027							

Tabel V - 17 Peta Jalan Jangka Menengah Smart Environment Tahun 2023-2027

Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam jutaan rupiah)						Sumber Dana	Leadline Sector				
							2023		2024		2025				2026		2027	
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran			Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran
Proteksi Lingkungan	Penguatan perlindungan lingkungan berbasis masyarakat melalui kolaborasi	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	12.4 Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota	Database terkait Penyusunan dokumen lingkungan hidup dapat	Jangka Menengah	4	Rp180.000.000	4	Rp180.000.000	4	Rp180.000.000	4	Rp180.000.000	4	Rp180.000.000	APBD	DPKPLH
							2023	2024	2025	2026	2027							

Sub-Dimensi	Strategi	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SN 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam jutaan rupiah)					Sumber Dana	Leading Sector								
							2023	2024	2025	2026	2027										
							Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja			Anggaran	Target Kinerja	Anggaran					
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat secara Aktif Dalam Penghargaan Lingkungan Hidup	17.1 Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	Pengembangan kampung iklim di setiap Desa/Kelurahan Pengembangan sekolah Adiwiyata di setiap kecamatan	Jangka Menengah	100,00	Rp165.000.000	100,00	Rp165.000.000	100,00	Rp165.000.000	20%	Rp2.000.000.000	20%	Rp2.000.000.000	23%	Rp2.000.000.000	2.000.000.000	APBD	DPKPLH
Tata kelola energi	Menciptakan Gerakan pemanfaatan energi terbarukan berbasis masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder	Program pengembangan listrik bersumber energi surya	Tingkat bauran energi terbarukan	3.9 Persentase bangunan di kota dengan pengukur energi cerdas	Listrik tenaga surya	Jangka menengah	5%	Rp2.000.000.000	10%	Rp2.000.000.000	15%	Rp2.000.000.000	20%	Rp2.000.000.000	23%	Rp2.000.000.000	23%	Rp2.000.000.000	2.000.000.000	APBN dan APBD	DPKPLH

Tabel V - 18 Peta Jalan Jangka Pendek Smart Environment Tahun 2023-2024

Sub Dimensi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Status Inovasi	Target Kinerja Anggaran (dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Leading Sector
						2023		2024			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
Proteksi Lingkungan	Pengarusutamaan perlindungan lingkungan berbasis masyarakat melalui kolaborasi berbagai stakeholder	Jumlah perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang diselesaikan	12.2 Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga	Sistem layanan terkait pengaduan lingkungan secara online	Jangka Pendek	10	Rp150.000.000	10	Rp150.000.000	APBD	DPKPLH
	Memberikan penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam penghargaan lingkungan hidup	12.2 Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga	Tim pengolahan sampah bekerja secara online/ dan membuat aplikasi terkait data pengolahan sampah	Jangka Pendek	212116	Rp750.000.000	212116	Rp750.000.000	APBD	DPKPLH
Pengelolaan Sampah Limbah	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan	12.2 Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga	Pengawasan melalui sistem pelaporan peaksanaan UKL-UPL melalui sistem informasi lingkungan	Jangka Pendek	100,00	Rp140.000.000	100,00	Rp140.000.000	APBD	DPKPLH
	Program Pengelolaan Sampahan	Persentase sampah yang tertangani	12.2 Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu	BERLIN (Bersih Lingkungan)	Quick Win	93,22%	Rp57.865.000.000	94,21%	Rp60.575.000.000	APBD	DPKPLH

Sub-Bidang	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator INI 37.122	Inovasi	Sifat Inovasi	Rahsat Kinerja (Anggaran dalam juta rupiah)				Sumber Dana	Leading Sectbr
						2023		2024			
						TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN		
Tata kelola energi	Menciptakan Gerakan pemanfaatan energi terbarukan berbasis masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder	Kegiatan pengembangan energi terbarukan berbasis sampah di tingkat desa	Jumlah desa yang telah memanfaatkan limbah sebagai sumber energi	Kampung Hijau Energi	Jangka Pendek	2 desa	Rp30.000.000,00	4 desa	Rp30.000.000,00	APBD dan CSR	DPKPLH
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	12.2 Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga	Sistem pelayanan terkait lingkungan hidup secara online	Jangka Pendek	1 Laporan	Rp100.000.000	1 Laporan	Rp100.000.000	APBD	DPKPLH